

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP AKTA NOTARIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RIZKY NOVIANTO

NIM 175010100111116



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM MALANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN
PENGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP
AKTA NOTARIS"**

Identitas Penulis :

a. Nama : Muhammad Rizky Novianto

b. NIM : 175010100111116

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada Tanggal : 30 Juni 2021

Pembimbing Utama



Moch. Zairul Alam, S.H., M.H

NIP. 197409092006041000

Pembimbing Pendamping



Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H

NIP. 2013048307232000

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum

NIP. 196705031991032002

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP AKTA NOTARIS

Oleh :

Muhammad Rizky Novianto

NIM 175010100111116

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 16 Juni 2021
dan disahkan pada tanggal 30 Juni 2021

Pembimbing Utama



Moch. Zairul Alam, S.H., M.H
NIP. 197409092006041000

Pembimbing Pendamping



Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H
NIP. 2013048307232000

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum
NIP. 196705031991032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada penulis Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda besar Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati iman dan islam.

Skripsi ini penulis buat dalam rangka memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran perkuliahan dan penulisan makalah ini, baik merupakan masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantara nya :

1. Bapak Dr. Muhammad Ali Safa'at, S.H.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Kepada Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah sabar membimbing, memberikan petunjuk serta arahan yang disampaikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar membimbing, memberikan petunjuk serta arahan yang disampaikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Almarhum Ayah atas segala dukungan, doa dan perjuangannya, sehingga secara khusus penulis dedikasikan skripsi ini untuk beliau.
6. Kepada Ibunda tercinta atas dukungan, doa serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar HMI Komisariat Hukum Brawijaya yang pada utamanya seluruh pengurus Bidang Penelitian dan Pengembangan yang telah menjadi teman dan rekan seperjuangan serta menjadi tempat

berproses bagi penulis dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal berkuliah di FHUB hingga selesainya skripsi ini.

8. Kepada Sahabat penulis selama kuliah Fazri Hasibuan, Ulfah Fadilah, Rafi Barchia, Sherina Nailah, Nabila Aulia, Hanjuang JR, Al Ghiffary, dan Rayhan Rizky yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis selama masa kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Sahabat SMA penulis Rizky Ardiansyah, Azaina Farah, Fakhri Ariza, Aldosetiadi, Vilia Thifalizalfa, dan Tiara Yudhistira yang telah memberi dukungan kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Sahabat SD penulis Zahra Rizaldy, Maulana Malik, dan Amilah Fika yang telah memberi dukungan kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak-pihak lain yang turut memberi dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, pemerintah, maupun praktisi hukum. Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 15 Maret 2021

Muhammad Rizky Novianto

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
RINGKASAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ORISINALITAS PENELITIAN	6
C. RUMUSAN MASALAH	9
D. TUJUAN PENELITIAN	9
E. MANFAAT PENELITIAN	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
G. METODE PENELITIAN	12
H. DEFINISI KONSEPTUAL	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
1. Tinjauan Umum tentang Notaris	17
1.1. Sejarah tentang Jabatan Notaris di Indonesia	17
1.2. Pengertian Notaris	22
1.3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris	23
2. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris	29
2.1. Akta Autentik	30
2.2. Akta Notaris	31
2.3. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Autentik	32

2.4. Nilai Pembuktian Akta Autentik	33
3. Tinjauan Umum tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris.....	36
3.1. Dapat dibatalkan	39
3.2. Akta Notaris Batal Demi Hukum	41
3.3. Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan.....	41
4. Tinjauan Umum tentang <i>Digital Signature</i>	43
4.1. Pengertian Tanda Tangan	43
4.2. Pengertian Tanda Tangan Digital (<i>Digital Signature</i>).....	44
4.3. Tujuan, Sifat dan Manfaat dari <i>Digital Signature</i>	45
4.4. Pembuatan dan Verifikasi <i>Digital Signature</i>	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Analisis keabsahan penggunaan <i>Digital Signature</i> terhadap Akta Notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia	50
1. Analisis keabsahan Digital Signature berdasarkan pendekatan pengaturan di Eropa dan Indonesia	50
1.1. Pendekatan Pengaturan Tanda Tangan Digital di Eropa	50
1.2. Pendekatan Pengaturan Tanda Tangan Digital di Indonesia	57
2. Analisis keabsahan penggunaan Digital Signature terhadap Akta Notaris..	60
2.1. Akta <i>relas</i>	60
2.2. Akta <i>partij</i>	64
B. Analisis akibat hukum dari penggunaan Digital Signature terhadap akta notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia.....	71
1. Peran Notaris dalam Kedaruratan dan Pandemi COVID-19	71
2. Akibat Hukum dari penggunaan <i>Digital Signature</i> terhadap Akta Notaris	75

3. Tanggung Jawab Hukum Notaris dan para pihak terkait dalam penggunaan <i>Digital Signature</i>	77
BAB IV PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian.....	7
Tabel 3.1 Perbandingan Rumusan E-Signature dalam UNITRAL <i>Model Law</i>	50
Tabel 3.2 Perumusan RUPS secara elektronik dalam UU PT.....	60
Tabel 3.3 Perumusan penerapan Perbuatan Melawan Hukum (<i>Tort</i>).....	78
Tabel 3.4 Pedoman perumusan aturan pengguna dan penyelenggara Digital Signature berdasarkan UNCITRAL <i>Model Law on E-Signatures</i>	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kualifikasi <i>E-Signatures</i>	54
Gambar 3.2 Enkripsi Simetris vs Enkripsi Asimetris	67
Gambar 3.3 Skema Enkripsi dan Dekripsi	68
Gambar 3.4 Skema Verifikasi <i>Digital Signature</i>	69



RINGKASAN

Muhammad Rizky Novianto, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2021, ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP AKTA NOTARIS, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Keabsahan Akta Notaris Terhadap Penggunaan *Digital Signature*. Penulis menilai bahwa penggunaan *Digital Signature* Terhadap Akta Notaris belum diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Padahal penggunaan *Digital Signature* menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi elektronik bagi Notaris atau *cyber notary* yang juga dapat membantu kondisi kedaruratan kesehatan dalam Pandemi COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana analisis keabsahan penggunaan *Digital Signature* terhadap Akta Notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia dan (2) Bagaimana analisis akibat hukum dari penggunaan Digital Signature terhadap akta notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Kemudian, penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

Dari penggunaan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa penggunaan *Digital Signature* terhadap Akta Notaris belum memiliki keabsahan sebagai akta autentik karena Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi sebagaimana bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penggunaan *Digital Signature* oleh Notaris terhadap akta notaris sepanjang belum diaturnya penggunaan *Digital Signature* terhadap Akta Notaris akan berakibat hukum terhadap Akta tersebut menjadi berkekuatan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (9).

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini kemajuan teknologi mengalami pertumbuhan secara luar biasa yang berdampak signifikan terhadap kehidupan manusia. Dampak dari kemajuan teknologi banyak menawarkan berbagai kemudahan, termasuk perkembangan telekomunikasi yang mengubah konsepsi ruang dan waktu sehingga memungkinkan hubungan antar manusia berlangsung tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Pertumbuhan teknologi juga merambah ke dalam sektor niaga berupa kegiatan transaksi elektronik. Dalam perspektif legalitasnya, kemajuan teknologi dalam suatu transaksi elektronik juga mengakibatkan beberapa masalah penting yang perlu dicermati, yakni: (i) kepastian identitas para pihak, dan (ii) kepastian keamanan dan autentisitas pesan yang dikomunikasikan.¹ Secara teknis, permasalahan tersebut dapat diatasi oleh penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang didukung oleh layanan sertifikasi elektronik (*Certification Service Provider* atau CSP) yang kemudian menjadi Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*). Penggunaan Tanda Tangan Digital (*digital signature*) yang didukung oleh layanan sertifikasi elektronik saat ini telah diadopsi dalam upaya untuk memenuhi kemajuan teknologi dan kebutuhan transaksi elektronik dalam sebuah regulasi. Saat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE.

¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2013. hlm. xiii

Dengan adanya pertumbuhan teknologi yang merambah ke sektor niaga juga telah menggantikan transaksi konvensional dengan transaksi yang menggunakan sistem elektronik atau transaksi elektronik. Hal ini juga berkaitan dengan rekomendasi tentang pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai hukum pada suatu dokumen elektronik sebagaimana kesepakatan global dalam forum *The United Nations Commision on International Trade Law* (UNCITRAL). Forum tersebut juga mencetuskan *Model Law on E-Commerce* (1996), dan *Model Law on E-Signatures* (2001), yang dapat mengakomodir kegiatan perniagaan secara elektronik dan pengaturan terkait tanda tangan elektronik bagi tiap negara dalam pengembangan sistem nasionalnya.

Tanda Tangan Elektronik sendiri adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.² Esensi dari adanya Tanda Tangan Elektronik adalah adanya suatu metode verifikasi dan autentikasi untuk mengidentifikasi subjek hukum berikut akuntabilitas atau reliabilitas sistem elektroniknya sesuai tujuan dari penggunaannya.³

Kemajuan teknologi tersebut menuntut pejabat umum yang memiliki fungsi dan peran penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, yakni Notaris, untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Secara konvensional notaris telah memiliki fungsi dan peran sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam suatu transaksi (*Trusted Third Party*). Sama halnya dalam konteks peran notaris dalam transaksi elektronik.⁴

Selanjutnya, demi pentingnya harmonisasi untuk menciptakan suatu kepercayaan dalam berniaga secara elektronik UNCITRAL juga membuat kajian tentang harmonisasi penyelesaian isu metode autentikasi yang berjudul *Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and*

² Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PSTE").

³ Edmon Makarim, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cybernotary* Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3: 2011. hlm 468.

⁴ *Ibid.*

Signature Methods (2009). Dalam kajian tersebut juga ditekankan mengenai peranan notaris publik dalam mencapai efektivitas kegiatan niaga secara elektronik dan pentingnya perkembangan *Hague Agreement* 1961 tentang *The Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, yang mengarahkan pejabat publik (dalam hal ini adalah notaris) untuk melakukan simplifikasi dalam mensertifikasi keautentikan suatu dokumen publik atau akta notariil menjadi bentuk elektronik (*electronic apostille*).⁵

Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam ruang transaksi elektronik tersebut kemudian populer dengan istilah *Cyber Notary*.⁶ *Cyber Notary* sendiri adalah konsep yang mengadopsi kemajuan teknologi bagi notaris untuk membuat akta autentik melalui dunia maya atau *cyberspace* serta dalam menjalankan tugas-tugasnya setiap hari. Peran Notaris dalam transaksi elektronik melalui *cyberspace* (*Cybernotary*) juga dikenal di berbagai negara, baik negara dengan sistem hukum *Common Law* maupun *Civil Law*. Hal ini dalam konteks perwujudan *e-Apostilles* untuk transaksi internasional yang berhubungan dengan *Hague Agreement* tahun 1961 tentang *Apostille, International Forum on e-Notarization, e-Apostilles and Digital Evidence* yang juga telah mendorong peranan notaris dalam transaksi elektronik global, sehingga saat ini *Cybernotary* dan *e-notarization* menjadi kata kunci utama dalam perwujudan *e-Apostilles*.

Sebagai contoh, Amerika dan Prancis adalah dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, Amerika merupakan negara yang menganut sistem hukum *Common Law* sedangkan Prancis menganut sistem hukum *Civil Law*, tetapi keduanya telah menerapkan *cybernotary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks keautentikan suatu dokumen elektronik dan penyelenggaraan tanda tangan elektronik (*digital signature*).⁷

Merujuk pada *International Congress XXIV* dari Latin Notaris pada tahun 2004, mengenai urgensi dari fungsi dan peran notaris dalam dunia maya, pada pokok

⁵ Makarim, Op.Cit., hlm. 117

⁶ *Ibid.*

⁷ Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 41, No. 3 (2011), diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/287> pada 25 Februari 2021

bahasan dari *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)* dapat disimpulkan bahwa konferensi ini menyadari adanya kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik.⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (yang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014) memiliki kewenangan lain sebagaimana dicantumkan dalam pasal *a quo* yang berbunyi: "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal *a quo*, telah tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang."

Merujuk pada Pasal *a quo*, Notaris diberikan kewenangan lain untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *Cyber Notary*. Secara konsep, *Cyber Notary* ingin memberikan bingkai hukum yakni bahwa tindakan menghadap para pihak atau menghadap notaris tidak lagi harus dilakukan secara fisik di suatu tempat tertentu, dalam hal ini memungkinkan para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan kedudukan dari wilayah jabatan notaris dan para pihak berada pada tempat yang berbeda pula.⁹ Sehingga kehadiran kewenangan notaris dalam bidang *cyber notary* dianggap dapat menjadi jawaban atas tuntutan disrupsi konsep ruang dan waktu tersebut. Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat tidak

⁸ XXIV *International Congress Of Latin Notaries*, "CONCLUSIONS OF THE WORKING GROUP FOR THEME II "The Notary and electronic contracts"" diakses dari <https://www.uinl.org/documents/20181/72328/MexicoTema+II+-+Conclusiones+%28EN%29/3c09d040-56ba-4f5a-8efd-720807df8c12> pada 22 Desember 2020 pukul 16.04 WIB

⁹ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary*, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung: 2012. hlm. xii

sepantasnya lagi diprasyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup menggunakan internet.¹⁰

Penggunaan *digital signature* sendiri juga menjadi solusi ketika terjadi kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 yang membuat para pihak tidak dapat bertemu secara tatap muka disebabkan protokol kesehatan yang mengharuskan untuk merubah seluruh kegiatan menjadi daring atau melalui *cyberspace*. Sehingga perlu juga dikaji apakah kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 dapat menjadi alasan penguat penerapan *digital signature* oleh notaris dalam kondisi darurat.

Meskipun pelaksanaan sertifikasi transaksi telah dilegitimasi oleh kewenangan lain Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) agar dapat dilakukan secara elektronik atau *cyber notary* serta perangkat teknologi saat ini juga telah menunjang pelaksanaan *Digital Signature* oleh Notaris. Namun, penerapan *Digital Signature* di Indonesia akan bertentangan dengan bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan kehadiran fisik Notaris dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi sebagaimana bagian penjelasan dari pasal *a quo*.¹¹ Hal ini juga sejalan dengan eksistensi asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang dapat diartikan bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional.¹² Dengan adanya asas tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bagi para notaris. Ditambah belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur terkait penggunaan *digital signature* oleh notaris dalam menjalankan jabatannya.

Kualifikasi seorang notaris dilandaskan pada tingkat kepercayaan dan etika yang tinggi. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak aman, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹³ Oleh karena itu, terhadap setiap aktanya, notaris harus bertanggung jawab penuh sebagai konsekuensi dari mutu dokumennya yang dapat dikategorikan sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan eksekutorial.

¹⁰ Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, him. 151.

¹¹ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

¹² Andes Wili Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, diakses dari <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> pada 1 Maret 2021 pukul 16.30 WIB

¹³ Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Walaupun peluang notaris untuk dapat menggunakan *digital signature* terlihat belum memungkinkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang tersebut, seperti Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan turunan dari UU ITE yang memberikan peluang bagi notaris untuk dapat menggunakan *digital signature* dalam menjalankan kewenangannya dan dapat pula memberikan dukungan jasa layanan sertifikasi elektronik, yakni melalui Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang menyebut bahwa keabsahan dari suatu *Digital Signature* dapat disetarakan dengan tanda tangan konvensional. Dijustificasi pula dengan keberadaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur Rapat Umum Pemegang Saham secara daring atau melalui media *teleconference*, yang selanjutnya risalah RUPS tersebut sebagai akta *relas* dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

Namun, peluang tersebut juga akan berisiko terhadap keotentikan daripada akta Notaris. Sebagaimana bagian penjelasan dari Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN yang mengharuskan Notaris hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi dan Pasal 16 ayat (9) yang menegaskan bahwa jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu skripsi hukum berjudul, "**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP AKTA NOTARIS**".

B. ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk membuktikan kebaruan penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian lain, penulis akan menjabarkan mengenai penelitian terdahulu sebagai perbandingan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Zainatun Rossalina / Universitas Brawijaya	KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY SEBAGIAN AKTA AUTENTIK	1. Bagaimana penyelesaian konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014? 2. Apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara <i>cyber notary</i> sah sebagai akta autentik?
2.	Fitri Fabiola / Universitas Sriwijaya	KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN	1. Bagaimana aspek yuridis tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana pengaturan norma dan praktik terkait tanda tangan elektronik dalam akta Notaris? 3. Bagaimana seyogyanya pengaturan norma dan praktik

Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- 8

TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS". Persamaan penelitian yang ditulis Fitri Fabiola dan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat isu keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan pada jenis tanda tangan elektronik yang dikaji adalah *Digital Signature*, dan penelitian ini juga dilakukan dengan kajian yang lebih mendalam dengan melakukan perbandingan pengaturan tanda tangan elektronik di Eropa dan Indonesia, analisis sistem elektronik yang menjamin keabsahan dari pelaksanaan suatu *digital signature* dan penggunaan dasar hukum yang lebih komprehensif.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana analisis keabsahan penggunaan *Digital Signature* terhadap Akta Notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana analisis akibat hukum dari penggunaan *Digital Signature* terhadap akta notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan penelitian harus mempunyai tujuan sehingga hasil dari penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis. Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis keabsahan penggunaan *Digital Signature* terhadap Akta Notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum dari penggunaan *Digital Signature* terhadap akta notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat penelitian terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hasil penelitian.

1.1. Manfaat Teoritis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, serta diharapkan memberi sumbangsih akademis bagi pengembangan aturan hukum di Indonesia dalam rangka meningkatkan kepastian hukum itu sendiri, penulis juga menaruh harapan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan atau dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya.
- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian mengenai Hukum Perdata, Hukum Telematika dan pengembangan Ilmu Kenotariatan terkait dengan penggunaan *Digital Signature* oleh Notaris terhadap pembuatan Akta Notaris.
- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian di bidang hukum selanjutnya.

1.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini adalah penggunaan *digital signature* oleh Notaris terhadap Akta Notaris.

Kepastian hukum menjadi hal yang esensial dalam hukum, terutama bagi jabatan notaris yang memiliki prinsip kehati-hatian¹⁴ dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan serta referensi bagi pemerintah untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait penggunaan *digital signature* oleh Notaris.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait keabsahan penggunaan *digital signature* terhadap akta Notaris.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan penelitian tidak hanya bermakna sebuah aturan penyusunan *draft* belaka, melainkan kepada penyusunan yang logis dan konsisten.

Adapun penulisan sistematika yang dimaksud ialah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Orisinalitas Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan serta diakhiri akan diuraikan mengenai bagaimana cara pelaksanaan penelitian, mulai dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum hingga bagaimana menganalisis penelitian melalui bahan hukum serta Definisi Konseptual.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

¹⁴ Pasal 4 ayat (2) UUNJN

Pada bab ini berisi tentang landasan teori pendapat para ahli/doktrin yang berasal dari referensi yang sah atau dari hasil penelitian maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian. Kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian dimana peneliti akan membahas mengenai pengertian Notaris, Tanda Tangan, Tanda Tangan Elektronik dan *Cyber Notary* serta tinjauan umum tentang Notaris, *Digital Signature*, *Cyber Notary* dan kajian lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dari pada rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis sebelumnya berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang akan dijelaskan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Selanjutnya penulis akan menguraikan atau memberi saran terkait penelitian yang diharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang ada di dalam lingkup pembahasan.

G. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹⁵ Penelitian tersebut dilakukan dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan berdasarkan pada logika keilmuan dari sisi normatif dimana letak obyeknya merupakan hukum itu sendiri.¹⁶ Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan menganalisis pada bahan hukum

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 50.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP PSTE") terkait dengan isu hukum "ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP AKTA NOTARIS"

b. Metode Pendekatan

Dalam menemukan jawaban dari rumusan masalah yang merupakan inti sari dari topik permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara mengkaji Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait dengan tema penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian tentang ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN DIGITAL SIGNATURE TERHADAP AKTA NOTARIS adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perbandingan karena pendekatan ini merupakan penjelasan perbandingan hukum dengan membandingkan kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenade Media Group, 2011), hlm. 93.

Undang.¹⁸ Pendekatan perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini membandingkan, melihat serta mengkaji unsur-unsur dalam suatu Undang-Undang yang dapat dibandingkan dengan membandingkan bahan hukum yang ada di Eropa yaitu UNCITRAL Model Law of E-Commerce (1996) dan UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) dalam mengatur *Digital Signature* guna menyempurnakan pengaturan yang ada di Indonesia tentang *Digital Signature* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁰ Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer meliputi statuta yang dibuat oleh badan legislatif, putusan pengadilan, Dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.²¹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

¹⁸ Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 174.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 141.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 49.

tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, buku-buku teks dan komentar atas putusan pengadilan.²²

Memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berasal dari jurnal-jurnal biasa maupun jurnal hukum yang ditulis oleh beberapa penulis dan beberapa sumber dari internet atau jurnal *online*, buku, dari beberapa artikel pendukung, berita *online*, serta pendapat para ahli.

d. Teknik Penelusuran Bahan

Teknik penelusuran bahan dalam penelitian hukum ini diakses dari studi kepustakaan yang kemudian bahan-bahan tersebut diidentifikasi, di klasifikasi dan di inventarisasi yang juga mengacu pada beberapa sumber-sumber bahan primer maupun sumber bahan-bahan sekunder yang telah dikumpulkan dan dapat diakses kembali untuk bahan menganalisis mengenai isu hukum yang sedang dibahas. Teknik penelusuran bahan dalam penelitian ini diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, beberapa sumber buku yang dikumpulkan peneliti, jurnal-jurnal hukum yang tersedia dalam online berkaitan pula dengan apa yang dibahas. Semua diakses melalui internet dan juga beberapa buku-buku dari penulis di bidang Hukum yang diakses juga melalui online.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

²² Marzuki, *Op.cit.*

Peneliti melakukan analisis bahan hukum dengan melakukan analisis interpretasi, yang dilakukan menggunakan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.²³ Metode yang digunakan adalah:

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran undang-undang menurut arti bahasa bertitik tolak pada arti perkataan dalam hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai dalam undang-undang. Selanjutnya bahasa yang digunakan dalam menafsirkan undang-undang itu berarti mencoba menangkap arti teks menurut bunyi kata-katanya.²⁴
- b. Penafsiran Sistematis, penafsiran yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun yang terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.²⁵

H. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yakni *recht matig* yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai "berdasarkan atas hukum". Keabsahan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai "*legality*" yang memiliki pengertian "*lawfulness*" atau sesuai dengan hukum. Sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak disahkan oleh Presiden maka tidak boleh diajukan kembali pada persidangan Dewan Perwakilan pada masa itu.²⁶
2. *Digital Signature* atau Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan elektronik yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

²³ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Nandar Maju, 2008), hlm. 93.

²⁴ Yudha Bakti Ardhiwisastara, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2000), hlm. 148

²⁵ *Ibid.*, hlm. 149

²⁶ Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang. 1977. hlm. 252.

3. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dan mempunyai kewenangan dari kekuasaan negara secara khusus untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata.
4. Akta Notaris adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat.²⁷
5. *Cyber Notary* dapat diartikan sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangannya berbasis pada teknologi informasi yang juga berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Secara sederhana konsep cyber notary ingin memberikan bingkai hukum yakni agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap notaris tidak perlu dilakukan secara fisik pada suatu tempat tertentu melainkan bisa melalui dunia maya (*cyberspace*) atau dilakukan secara daring (online).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Notaris

1.1. Sejarah tentang Jabatan Notaris di Indonesia

Jabatan notaris di Indonesia menurut sejarah diketahui ditunjuk pada tahun 1620 oleh yang disebut sebagai "Gubernur Jenderal" dari *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Selanjutnya pada tahun 1800-an, pemerintah Belanda mengenalkan notaris sebagai lembaga hukum dan pejabat publik, berdasarkan Resolusi Gubernur Jenderal Nomor 8 tanggal 7 Maret 1922.²⁸

Sejarah notaris di Belanda sendiri diketahui sejak Prancis menjajah Belanda pada tahun 1806 hingga tahun 1813 yang dilakukan oleh Raja Louis Napoleon, sehingga Belanda sebagai Negara jajahan akan secara otomatis mengadopsi sistem kenotariatan dengan gaya Latin, yang mana sebelumnya telah dianut oleh Prancis

²⁷ Pasal 1868 KUHPperdata

²⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 5

sebagai Negara penjajah. Pada tanggal 1 Maret 1811, melalui Dekrit Kaisar berlakulah undang-undang kenotariatan Prancis di Belanda.²⁹

Hukum notaris di Prancis merupakan langkah revolusioner dalam sejarah peraturan perundang-undangan notaris sebagai sebuah institusi. Menurut *The Loi Ventose* (1803), "notaris adalah pejabat publik yang didirikan untuk menerima semua tindakan dan kontrak yang harus atau ingin diinvestasikan oleh para pihak dengan karakter keaslian yang melekat pada tindakan otoritas publik, dan untuk memastikan tanggal mereka dan untuk menyimpannya dalam simpanan dan untuk memberikan contoh dan salinan resminya." *The Loi Ventose* juga mengatur aturan penting terkait notaris seperti hak dan kewajiban notaris, daftar profesi serta aktivitas yang tidak sesuai dengan profesi notaris, deskripsi mengenai segel notaris, daftar persyaratan bagi pemohon, batas jumlah notaris di wilayah tertentu dan lain-lainnya. Ditetapkan pula bahwa meterai notaris memberikan suatu status autentik pada dokumen yang dikeluarkan oleh notaris, dan validitasnya di bagian negara mana saja.³⁰

Pasca Belanda lepas dari jajahan Prancis pada tahun 1813, undang-undang kenotariatan Prancis yang sebelumnya berlaku di Belanda tetap digunakan sampai tahun 1842, yakni saat Belanda memberlakukan Undang-Undang tertanggal 19 Juli 1842 melalui *Nederland Staatsblad* Nomor 20 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris atau *Wet op het Notarisambt* (*Notariswet*) pada dasarnya koheren dengan undang-undang yang dibuat oleh Prancis sebelumnya (*Ventosewet*) dengan penyempurnaan. Contohnya tentang proses teknis pembuatan akta, penggolongan notaris, dewan pengawas dan masa magang.³¹

Undang-undang kenotariatan Belanda yang merupakan hasil penyempurnaan dari Undang-undang Prancis ini tidak ikut diadopsi ke dalam hukum Indonesia saat masa penjajahan Belanda, melainkan justru yang berlaku adalah peraturan yang digunakan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ W.W. Smiters, "History of the French Notarial System", diakses dari https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7217&context=penn_law_review pada 5 Maret 2021

³¹ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Anke Dwi Saputro (Ed.), *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT Gramdia Pustaka, 2009).

oleh Belanda sebelum dijajah Prancis. Pada tahun 1860, barulah peraturan yang digunakan oleh Belanda (*Notariswet*) berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) tertanggal 1 Juli 1860. Sehingga jika ditelusuri, undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari peraturan kenotariatan Prancis yang berlaku di Belanda yang telah disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris merupakan salinan pasal-pasal dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda.³²

Melalui *College Van Schepenen*, pada tanggal 16 Juni 1625 telah dikeluarkan instruksi bagi para notaris agar dipisahkan antara Jabatan Notaris dan Jabatan Sekretaris. Instruksi tersebut memuat 10 (sepuluh) pasal yang menetapkan bahwa notaris dilarang untuk menyerahkan salinan akta-akta milik kliennya dan wajib merahasiakan seluruh informasi yang diperoleh dari kliennya. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 1822 melalui *nederland staatsblad* No. 11 dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, yang berdasarkan instruksi tersebut, diatur terkait wewenang serta batasan dari seorang notaris berupa penegasan bahwa notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak sebagaimana Pasal 1 instruksi tersebut, diberikan pula kepadanya kekuatan untuk melakukan penetapan dan memastikan tanggal, menyimpan akta asli atau memintanya, mengeluarkan *grosse*-nya, melakukan pengesahan, demikian pula memberikan salinan yang benar.

Pada tanggal 27 Agustus 1620, keberadaan notaris di Indonesia dimulai dari pengangkatan Notaris pertama di Indonesia yakni Melchior Kerchem. Kerchem adalah seorang sekretaris *College van Schepenen* yang bertugas menjadi seorang *Notarius Publicus*.³³ Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan notaris lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang pada saat itu dirasa semakin penting, ditambah dengan kesibukan kota Batavia kala itu.³⁴ Pada jaman itu, dibuat kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang mengatur kuota Notaris di setiap daerah. Pada mulanya Notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian ditambah menjadi dua orang pada tahun 1650. Kemudian pada tahun 1654

³² Sudut Hukum, "Sejarah Notaris di Belanda dan Indonesia" diakses dari <https://suduthukum.com/2016/08/sejarah-notaris-di-belanda-dan-indonesia.html> pada 5 Maret 2021.

³³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris* (Depok; Raih Asas Sukses, 2009), hlm.

27

³⁴ *Ibid.*

ditambah menjadi tiga orang, selanjutnya pada tahun 1671 menjadi lima orang, dengan ketentuan bahwa empat orang harus bertempat tinggal di Jakarta dan satu orang lainnya bertempat di luar kota. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing notaris tersebut dapat memperoleh penghasilan yang sesuai.

Pasca kemerdekaan Indonesia, pemerintah pada saat itu tidak langsung mengembangkan regulasi baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Namun keberadaan Notaris sendiri pasca kemerdekaan Indonesia masih diakui sebagaimana ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu "segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."³⁵ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang *a quo*, maka *Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang berlaku sejak tahun 1860 tersebut dipakai sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kenotariatan di Indonesia sampai dengan tahun 2004, sedangkan substansi dari Peraturan Jabatan Notaris tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Jika dibandingkan dengan peraturan utamanya yang disebut sebagai *Notariswet*. Peraturan tersebut sudah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris merupakan sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan.

Pada tahun 1948, sebagaimana Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60 tertanggal 30 Oktober 1948 tentang lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman telah mengakibatkan perubahan kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (Saat ini disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang disahkan pada tahun 1948. Selanjutnya, sejak tanggal 13 November 1954 melalui Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil

³⁵ Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa:

- 1) Kalau notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu;
- 2) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Perubahan pada Peraturan Jabatan Notaris yang baru dapat dijalankan sejak Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan *ord.stb/1860* Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

Sejak dijalankannya perubahan pada Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang baru pada tanggal 6 Oktober 2004 berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka secara serta merta Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 berdasarkan *ord.stb/1860* No.3 sudah tidak berlaku.

Pada tanggal 6 Oktober 2004, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi beberapa peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sejak tanggal 6 Oktober 2004 maka sebagaimana ketentuan tersebut telah mencabut dan menyatakan bahwa tidak berlaku lagi beberapa peraturan-perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris sebagaimana berikut:³⁶

- 1) *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;

³⁶ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 2) *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Notaris Sementara (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan umum (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabaran Notaris.

Telah dijelaskan sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN), yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan yang diperbaharui kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku bagi seluruh penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.³⁷ Pada tanggal 6 Oktober 2004 UUJN menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Indonesia. Kemudian, pada 10 tahun setelahnya diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi undang-undang yang berlaku bagi para Pejabat Notaris hingga penelitian ini dibuat.

1.2. Pengertian Notaris

Kata *Notaris* sendiri berasal dari kata *Notarius* yang merupakan nama pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalani pekerjaan menulis. Nama *Notarius* tersebut lambat laun memiliki arti bagi mereka yang mengadakan pencatatan dengan penulisan cepat, sebagai contoh saat ini adalah *stenograaf*.³⁸

³⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁸ R. Soegono Notodisoejo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13

Merujuk ke dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".³⁹

Jika menurut definisi pada Pasal 1 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum (*openbare ambtenaar*), tetapi ia bukan pegawai menurut peraturan perundang-undangan kepegawaian negeri sipil. Notaris bukan *bezoldigd staatsambt*, karena tidak menerima gaji melainkan menerima honorarium atas jasanya terhadap masyarakat.⁴⁰ Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat untuk melayani masyarakat

Notaris merupakan *public servant* yang diangkat oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengesahan dokumen-dokumen legal. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Notaris bertindak secara pasif dalam artian mereka hanya bekerja ketika masyarakat datang untuk selanjutnya dapat mereka layani. Sebagai profesi yang terhormat, Notaris berkewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* mengatur mengenai Jabatan Notaris. Seperti Undang-Undang Jabatan Notaris yang wajib untuk ditaati oleh Notaris ataupun peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur terkait kewajiban notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan.⁴¹ Pada dasarnya, notaris diangkat oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik, sehingga kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap notaris digunakan untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban bagi Notaris merupakan sebuah kewajiban jabatan.

1.3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Dalam pengertian Notaris yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

³⁹ Pasal 1 ayat (1) UUJN

⁴⁰ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 45

⁴¹ Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal *a quo* tersebut diuraikan secara jelas dalam Pasal 15 UUJN, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mengenai kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang."

Bila dikaitkan dengan Pasal 1 *Stbl.* 1860 Nomor 3 tentang *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."⁴²

Jika melihat pada kedua ketentuan terkait kewenangan Notaris tersebut, ternyata memiliki kesamaan jika dikaitkan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud sebagai pejabat umum yakni seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah serta diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam kebutuhan tertentu seperti legalisasi dokumen sebagai bentuk keikutsertaannya dalam melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan pemerintah.

Sehingga dengan demikian, hal tersebut semakin mempertegas kedudukan Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan bahwa:

⁴² G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm.3



"suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".⁴³

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ditunjukkan bahwa keautentikan daripada suatu akta bergantung pada bentuk akta tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang serta dibuat oleh pejabat umum yang diberikan kewenangan pada wilayah hukum kewenangannya. Ditunjukkan pula dalam hal ini bahwa Notaris memiliki kewenangan utama untuk membuat akta autentik sehingga akta yang dibuat oleh Notaris akan berkedudukan sebagai akta autentik.

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban Notaris, bahwa sebagai seorang pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haruslah dapat mempertanggungjawabkan tiap perbuatan dan tindakan yang ia lakukan, pelaksanaan tersebut tidak hanya dilakukan demi menjaga nama baiknya melainkan juga menjaga kehormatan serta nama baik daripada lembaga kenotariatan yang menjadi wadah bagi Notaris di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka melalui UUJN diatur mengenai kewajiban-kewajiban Notaris yang berdasarkan Pasal 16 UUJN menyebutkan bahwa:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

⁴³ Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.⁴⁴

Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dasar dalam pasal-pasal tersebut yang mengatur mengenai kewajiban jabatan Notaris.

Sebagaimana ketentuan dasar dalam pasal-pasal tersebut yang mengatur mengenai kewajiban dari Jabatan Notaris maka dalam hal ini Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka dapat dipastikan bahwa Notaris tersebut akan dekat dengan pelanggaran jabatan yang juga akan berdampak pada keabsahan ataupun keautentikan akta yang dibuatnya dan juga dapat pula dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebagai pejabat publik yang diberikan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan sebelumnya, Notaris juga disertai larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN, sebagai berikut:

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

⁴⁴ Pasal 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris

h. menjadi Notaris Pengganti; atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.⁴⁵

Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antara Notaris dalam melaksanakan jabatannya, maka diatur larangan dalam ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah hukum jabatan Notaris, Pasal 18 UUNJ mengatur terkait Notaris memiliki tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, dan memiliki wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dari provinsi dimana daerah tempat kedudukannya. Selanjutnya terkait Notaris hanya dapat memiliki satu kantor, yakni di tempat kedudukannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUNJ. Konsekuensi dari pasal tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UUNJ bahwa Notaris tidak berwenang menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya. Sehingga, Notaris dilarang memiliki kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk kantor lainnya, sehingga akta Notaris hanya dapat dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu.

Notaris juga hendaknya memperhatikan ketentuan terkait dengan honorarium berdasarkan Pasal 36 UUNJ yang merupakan hak Notaris atas jasa yang diberikan sebagaimana kewenangannya. Dengan catatan bahwa notaris tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding dengan rekan-rekan lainnya. Namun, tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasanya di bidang kenotariatan secara cuman-cuman kepada orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUNJ.

2. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris

Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris (UUNJ) menyebutkan bahwa pada awal atau kepala akta wajib memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Dan juga pada akhir akta wajib dicantumkan beserta tanda tangan

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 17.

notaris berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUJN. Pencantuman nama Notaris pada awal atau kepala akta dan pencantuman nama beserta tanda tangan Notaris pada akhir akta merupakan perintah dari UUJN, yang juga menjadi bagian dari syarat formal suatu akta Notaris. Jika syarat formal tidak dipenuhi, baik sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 UUJN, maka konsekuensi terhadap akta Notaris tersebut hanyalah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 UUJN dan juga derajat akta hanya sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1869 KUHPdata (*Burgerlijk Wetboek*).

2.1. Akta Autentik

Istilah Akta Autentik disebutkan dalam Pasal 1867, dan batasan secara unsur berkenaan dengan Akta Autentik disebutkan dalam Pasal 1868, yaitu:

- a. Akta tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat Umum oleh — atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini karena substansi dari akta autentik tersebut telah termasuk seluruh unsur bukti:⁴⁶

- a. tulisan;
- b. saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah

Sebagai akta yang berkekuatan pembuktian sempurna maka dapat ditentukan bahwa seluruh pihak akan terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang *incracht*.

⁴⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2011), hlm. 6.

Akta autentik merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat yang dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, sehingga akta autentik tidak hanya dapat dibuat oleh Notaris, melainkan juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁴⁷

2.2. Akta Notaris

Akta-akta yang dibuat oleh pejabat Notaris merupakan akta yang membuat "*relaas*" atau yang menjabarkan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu kondisi yang disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya oleh seorang Notaris dinamakan sebagai akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris sebagai pejabat umum.⁴⁸

Namun Akta Notaris juga dapat memuat suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan hasil dari uraian yang diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalani jabatannya dan juga untuk keperluan dimana pihak lain sengaja datang dihadapan Notaris dengan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar selanjutnya keterangan tersebut akan dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Akta tersebut digolongkan sebagai akta yang dibuat "dihadapan" (*ten over staan*) Notaris. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) golongan akta notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau yang selanjutnya disebut sebagai "*Akta Relaas*" atau "Akta Pejabat" (*ambtelijke akten*), sedangkan;
- b. Akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau yang selanjutnya disebut sebagai "*Akta Partij*" (*partij akten*);⁴⁹

Sebagai contoh, yang termasuk dalam "*Akta Relaas*" antara lain seperti Akta pencatatan budel, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam perseroan terbatas, dan akta-akta lain sebagainya.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ G.H.S. Lumbun Tobing, *Op.Cit.*, hlm.51.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 51-52.



Sedangkan, yang termasuk dalam "*Akta Partij*" antara lain seperti perjanjian kredit, jual-beli, akta pernyataan keputusan rapat (tidak termasuk lelang), kuasa, kemauan terakhir penghadap (wasiat), dan akta-akta lain sebagainya.

Pada hakikatnya, pembuatan akta notaris baik *Akta relaas* ataupun *Akta Partij* dalam pembuatannya didasari atas keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak. Jika tidak ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dibutuhkan.⁵⁰ Dalam upaya untuk memenuhi permintaan dari para pihak dalam pembuatan akta autentik, Notaris dapat memberikan saran ataupun pendapat dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kedudukan Notaris dalam pembuatan akta autentik, Notaris bukanlah berkedudukan sebagai para pihak dalam akta tersebut melainkan diluar para pihak, yakni sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara melalui undang-undang untuk membuat akta autentik. Berkaitan dengan kedudukan Notaris tersebut, maka apabila dikemudian hari Akta Notaris tersebut dipermasalahkan terkait keautentikannya, maka Notaris tidak dapat dihadapkan sebagai pihak yang turut andil dalam perkara perdata tersebut, karena Notaris hanya menjamin kebenaran identitas para penghadap maupun menjamin kepastian tanggal daripada pembuatan Akta Notaris tersebut, sedangkan terhadap kebenaran materiil dari substansi Akta Notaris merupakan tanggung jawab pribadi daripada penghadap yang dalam hal ini berlaku pada *Akta Partij*. Sedangkan dalam hal *Akta Relaas*, kebenaran identitas para penghadap, kepastian waktu pembuatan akta maupun kebenaran materiil dari substansi suatu *Akta Relaas* tidak dapat dipermasalahkan keautentikannya.

2.3. Syarat Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN, akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sejalan dengan pendapat **Irawan Soerodjo**, bahwa

⁵⁰ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 57.

terdapat 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yakni:⁵¹

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Dikemukakan pula oleh **Philipus M. Hadjon**, bahwa syarat autentik adalah:⁵²

- a. Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

2.4. Nilai Pembuktian Akta Autentik

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, dengan nilai-nilai pembuktian sebagai berikut:

2.4.1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah dari sebuah akta Notaris merupakan kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*). Secara lahiriah, jika dilihat dari luar sebagai akta autentik serta sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai syarat akta autentik, maka berlakulah akta tersebut sebagai akta autentik, hingga terbukti sebaliknya, sehingga dapat diartikan bahwa sampai dibuktikan sebaliknya akta tersebut merupakan akta autentik.

Beban pembuktian dalam aspek nilai lahiriah suatu akta autentik berada pada pihak yang menyangkal keautentikan dari akta Notaris tersebut. Indikator yang menentukan akta Notaris adalah sebagai akta autentik, yakni tanda tangan dari

⁵¹ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

⁵² Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, (Surabaya: Surabaya Post, 2001), hlm.3

Notaris yang bersangkutan, baik yang berada pada Minutan, Salinan, dan dari bagian awal akta (judul) sampai dengan bagian akhir akta.⁵³

Dalam aspek lahiriah suatu akta Notaris, nilai pembuktian akta tersebut harus dilihat *apa adanya*, bukan dilihat *ada apanya*. Dalam hal aspek lahiriah, tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya, karena jika ada pertentangan tersebut yang menilai bahwa suatu akta Notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, maka yang bersangkutan wajib untuk membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah.

Peingkar atau Penyangkalan terhadap nilai keautentikan suatu akta Notaris, secara lahiriah, harus berdasarkan kepada syarat-syarat suatu akta Notaris dinyatakan sebagai akta autentik. Pembuktian terhadap penyangkalan ini harus melalui upaya gugatan ke pengadilan. Pihak penggugat harus membuktikan bahwa akta yang menjadi objek gugatan tersebut bukan akta Notaris secara lahiriah.

2.4.2. Formal (*formele bewijskracht*)

Kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang termuat dalam akta Notaris harus diberikan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada waktu sebagaimana tercantum di dalam akta tersebut sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang termuat di dalam undang-undang. Untuk membuktikan kebenaran secara formal, perlu kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap (pukul), dan para pihak yang menghadap, tanda tangan dari para pihak, saksi dan Notaris. Dan juga membuktikan apa yang disaksikan, dilihat dan didengar oleh Notaris (pada akta pejabat), serta mencatatkan keterangan dari para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika terjadi peingkar terhadap suatu akta Notaris dalam aspek formal, maka para pihak harus membuktikan dari formalitas akta tersebut, yakni harus dapat membuktikan kesalahan pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat menghadap, membuktikan kesalahan terhadap apa yang disaksikan, dilihat,

⁵³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 55.

didengar oleh Notaris, dan juga harus membuktikan kesalahan keterangan dari para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris, serta kesalahan pada tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun pada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Sehingga, pihak yang melakukan penyangkalan tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika pihak penyangkal tidak mampu membuktikan kesalahan tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh seluruh pihak.⁵⁴

Siapa pun berhak untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap aspek formal dari suatu akta Notaris, selama yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran tersebut harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa terdapat kesalahan pada aspek formal dalam akta tersebut, semisal seperti bahwa yang bersangkutan merasa tanda tangan yang termuat di dalam akta bukan tanda tangan dirinya.⁵⁵

2.4.3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Berkaitan dengan materi suatu akta merupakan sebuah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang memperoleh hak dan berlaku untuk umum, selama tidak terbukti sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan yang termuat dalam akta pejabat atau berita acara, atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) serta para pihak harus dinilai *benar berkata* sebagaimana dimuat dalam akta berlaku sebagai benar atau setiap orang yang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dimuat dalam akta harus dinilai telah *berkata benar*. Jika pada faktanya keterangan dari para penghadap tersebut menjadi *berkata tidak benar*, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari para pihak tersebut. Notaris terlepas dari hal tersebut. Sehingga demikian isi akta Notaris memiliki kepastian sebagai yang sebenarnya bukti yang sah untuk para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak.

⁵⁴ G.H.S Lumban Tobing, *op.cit*, hlm. 54-56.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.61

Untuk membuktikan aspek materiil dari suatu akta, maka pihak yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata di hadapan Notaris menjadi *berkata tidak benar*, dan perlu dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil daripada akta Notaris tersebut.

Aspek-aspek tersebut merupakan kesempurnaan daripada akta Notaris sebagai akta autentik dan bagi siapa pun yang terikat oleh akta tersebut. Jika dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa terdapat salah satu dari aspek diatas tidak benar, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau juga dapat dikatakan terdegradasi.

3. Tinjauan Umum tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris

Berkenaan dengan Kebatalan dan Pembatalan terhadap Perikatan diatur dalam Buku III, Bagian Kedelapan, Bab IV (Pasal 1446 – Pasal 1456 KUHPerdara). Namun pada bagian ini hanya secara sumier mengatur sebagian daripada Kebatalan, pada khususnya perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak cakap, yakni mereka yang di bawah umur, ditaruh di bawah *curatele*, serta cacat dalam kehendak. Cacat dalam kehendak dapat terjadi karena adanya tipuan, kekeliruan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan.⁵⁶

Dalam penerapannya juga tidak ada istilah Kebatalan yang pasti, sebagaimana diuraikan oleh **Herlien Budiono**, bahwa:⁵⁷

"Manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan secara sederhana dengan istilah 'batal', tetapi kadang kala juga menggunakan istilah 'batal dan tak berhargalah' (Pasal 879 KUHPerdara) atau 'tidak mempunyai kekuatan' (Pasal 1335 KUHPerdara). Dalam penggunaannya, istilah-istilah tersebut kadang kala cukup membingungkan karena istilah yang sama hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda, seperti 'batal demi hukum' atau 'dapat dibatalkan'. Dapat ditemukan dalam Pasal 1446 KUHPerdara dan seterusnya yang

⁵⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 367-368.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 364.

menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah 'batal demi hukum', 'membatalkannya' (Pasal 1449 KUHPPerdata), 'menuntut pembatalan' (Pasal 1450 KUHPPerdata), 'pernyataan batal' (Pasal 1451-1452 KUHPPerdata), 'gugur' (Pasal 1545 KUHPPerdata), dan 'gugur demi hukum' (Pasal 1553 KUHPPerdata)."

Dalam uraian di atas, terdapat dua istilah yang berbeda yakni Pembatalan dan Kebatalan, tetapi dipergunakan dengan alasan yang sama.⁵⁸ Pembatalan dan Kebatalan tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan di atas, artinya bahwa dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apa suatu perikatan atau perjanjian termasuk ke dalam kualifikasi istilah Kebatalan atau Pembatalan.

Penerapan daripada kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah *batal demi hukum* (*nietig*) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menilai suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yakni ketika disebabkan suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*), dan istilah *dapat dibatalkan* jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yakni ketika sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbinden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*).⁵⁹

Jika syarat objektif tersebut tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian tersebut juga dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sepanjang adanya permintaan dari orang-orang tertentu atau pihak yang berkepentingan. Ancaman untuk dibatalkan kerap membayangi syarat subjektif ini. Biasanya, yang mengancam adalah pihak berkepentingan seperti orang tua, wali, atau pengampu. Maka dari itu, diperlukan penegasan dari pihak yang berkepentingan mengenai perjanjian yang akan tetap berlaku dan mengikat seluruh pihak. Kebatalan seperti ini disebut sebagai Kebatalan *nisbi* atau *relatif* (*relatief nietigheid*).

⁵⁸ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 64.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

Dapat pula terjadi batal mutlak terhadap suatu perjanjian, jika perjanjian tersebut tidak dipenuhi, padahal undang-undang sudah menentukan perbuatan hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan yang sudah ditentukan, atau dapat pula berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum⁶⁰, disebabkan perjanjian tersebut berkonsekuensi dianggap tidak ada, maka tidak ada lagi dasar bagi para pihak untuk bisa saling menuntut ataupun menggugat dengan cara atau bentuk apapun.⁶¹ Sebagai contoh, semisal suatu perjanjian wajib dibuat dengan akta Notaris, tetapi ternyata tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Kebatalan seperti ini juga dapat disebut sebagai *Kebatalan mutlak (absolute nietigheid)*.

Merujuk pada UUJN, berkenaan dengan Kebatalan atau Pembatalan akta Notaris, telah diatur dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar atau tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf i, k, Pasal 41, pasal 44, pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, pasal 52, maka dinyatakan bahwa akta yang bersangkutan hanya *mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum*.

Suatu akta Notaris dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat ditentukan dan dilihat dari:

1. Pasal-pasal tertentu yang mengatur secara langsung bahwa jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta tersebut akan terdegradasi sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika dalam pasal yang bersangkutan tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka dalam pasal lainnya yang dikategorikan melanggar berdasarkan Pasal 84 UUJN, dapat dikategorikan sebagai akta yang batal demi hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa jika disebutkan dalam pasal tersebut suatu akta Notaris dapat mempunyai akta di bawah tangan, maka akta tersebut akan

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003, hlm. 203

⁶¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 22

terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian di bawah tangan, sedangkan terhadap pasal yang tidak disebutkan, maka termasuk sebagai akta yang batal demi hukum.

Suatu akta Notaris dapat batal atau batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan terjadi ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, tanpa diperlukan adanya tindakan hukum tertentu dari pihak yang bersangkutan. Sehingga, Kebatalan bersifat pasif, yang dapat diartikan bahwa tanpa adanya tindakan aktif berupa upaya apapun dari para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian tersebut, maka akan batal atau batal demi hukum secara serta merta ketika syarat-syarat tidak terpenuhi.⁶²

Namun dalam hal Pembatalan, bersifat aktif, meskipun syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, tetapi jika pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut berkehendak untuk melepaskan dirinya dari perjanjian tersebut dengan alasan tertentu, baik berdasarkan atas kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan kepada pengadilan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, Kebatalan akta Notaris dapat meliputi:

3.1. Dapat dibatalkan

Pasal 1320 KUHPerdota mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yang pertama adalah syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek dari perjanjian, yakni pihak yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata *sepakat* dan subjek tersebut *cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum*. Hal ini juga berkaitan bahwa akta Notaris merupakan perjanjian dari para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut, sehingga syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdota haruslah dipenuhi.

Dalam hal akta Notaris, syarat subjektif tercantum dalam Awal akta, sedangkan syarat objektif tercantum dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta tersebut juga merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdota yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak yang juga memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada para pihak yang termuat dalam perjanjian yang dibuat.⁶³ Maka, jika pada

⁶² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 366.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 219

awal akta, terutama dalam hal syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi sebagai syarat subjektif, maka akta tersebut dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang bersangkutan. Akta Notaris tersebut juga dapat termasuk *ex nunc*, yang berarti bahwa perbuatan serta akibat dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukan pembatalan.

Syarat subjektif yang pertama adalah harus adanya kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan, tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun, tetapi semata-mata keinginan daripada para pihak yang bersangkutan. Dalam Pasal 1321 KUHPerdata ditegaskan bahwa apabila dapat dibuktikan jika suatu kontrak disepakati di bawah paksaan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan terhadap orang yang diancam sehingga orang tersebut tidak memiliki pilihan lain, selain menandatangani kontrak tersebut, maka akta tersebut dapat dibatalkan.⁶⁴

Berkenaan dengan hal tersebut, dikenal doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence*) yang dapat digunakan melalui kedudukan seseorang (semisal jabatannya, baik pemerintahan atau politik) untuk melakukan penekanan kepada pihak tertentu. Dalam keadaan seperti ini, pihak yang ditekan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menghindari tekanan dari pihak lainnya selain menerima isi akta yang diberikan kepadanya untuk selanjutnya dapat disepakati olehnya. Maka dapat dikatakan dalam doktrin tersebut tidak ada kekerasan fisik atau ancaman, melainkan lebih dititikberatkan pada keadaan salah satu subjek dalam akta tersebut.

Syarat subjektif yang kedua adalah adanya kecakapan untuk melakukan tindakan dari pihak yang bersangkutan. Untuk melakukan suatu tindakan hukum dari para pihak dalam suatu akta, dibutuhkan kecakapan yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu yang jika tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan subjek hukum yang akan bertindak dan bertanggungjawab dalam akta tersebut.

Subjek hukum menyangkut hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Dalam hal suatu akta,

⁶⁴ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 23

subjek merupakan pihak yang bertindak dan bertanggungjawab atas akta yang bersangkutan.

3.2. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Dalam suatu perjanjian, unsur objektif yang pertama adalah adanya objek yang tertentu (*clear and definite*) yang diperjanjikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPdata bahwa prestasi merupakan pokok atau objek dari perjanjian. Dan berdasarkan Pasal 1332 dan 1334 KUHPdata, bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian, baik barang-barang itu sudah ada atau yang baru akan ada kelak.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPdata, yang berbunyi: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPdata", sehingga dapat diartikan bahwa suatu Prestasi hanya mengikat pihak-pihak yang tersebut di dalam akta.⁶⁵

Kemudian, unsur objektif yang kedua adalah substansi perjanjian merupakan sesuatu yang diperbolehkan, baik menurut undang-undang, kebiasaan, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian tersebut dibuat dan ketika akan dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPdata bahwa suatu kesepakatan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya pada Pasal 1336 KUHPdata disebutkan bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi terdapat sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, maka persetujuan tersebut tetap sah.

3.3. Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta di Bawah Tangan

⁶⁵ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 76.

Dalam Pasal 1869 KUHPdata telah diatur mengenai batasan akta notaris yang terdegradasi sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 2) tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- 3) cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan dalam pasal tersebut tercantum secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menyebutkan jika dilanggar, maka konsekuensinya akan berakibat pada akta Notaris yang terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, adapun pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1. jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, yakni tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
2. Jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yakni jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta, dan
3. Jika melanggar ketentuan Pasal 41 dengan merujuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40.

Akta Notaris merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, selama seluruh ketentuan prosedur pembuatan akta dipenuhi. Jika terdapat prosedur yang tidak dipenuhi, dan dapat dibuktikan, maka akta tersebut melalui proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang terdegradasi sebagai akta di bawah tangan. Jika terjadi seperti itu, maka nilai pembuktian atas akta tersebut diserahkan kepada hakim.

Kemudian berkaitan dengan pembatalan terhadap akta Notaris, dalam hukum kenotariatan, apabila suatu akta Notaris di kemudian hari dipermasalahkan oleh para pihak, maka solusi yang dapat dijalankan oleh para pihak adalah:

a. Para pihak harus kembali kepada Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta pembatalan terhadap akta Notaris tersebut, maka dengan demikian akta Notaris yang dibatalkan tersebut sudah tidak mengikat bagi para pihak, dan para pihak menanggung segala konsekuensi dari pembatalan tersebut. Pembatalan ini tidak dapat dilakukan atas prakarsa Notaris itu sendiri, melainkan harus merupakan inisiatif murni yang juga disepakati oleh para pihak.⁶⁶

b. Apabila para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta Notaris sebagaimana solusi yang telah diuraikan pada poin a, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah gugatan tersebut, hakim yang memeriksa dapat memberikan penafsiran terhadap akta Notaris yang telah didegradasikan tersebut, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan yang dalam hal ini tergantung pada pembuktian dan penilaian hakim.⁶⁷

4. Tinjauan Umum tentang *Digital Signature*

4.1. Pengertian Tanda Tangan

Tanda tangan dalam penggunaannya merupakan suatu kebiasaan formal yang digunakan seseorang untuk menyatakan persetujuan, sekaligus untuk memastikan identitas (*authentication*) orang yang bertanda tangan tersebut, baik terhadap sesuatu yang berakibat hukum ataupun tidak.

Dalam arti umum, tanda tangan adalah sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari penandatanganan, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat

⁶⁶ Pembatalan menggunakan akta pembatalan selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1420 K/Sip/1978, tanggal 1 Mei 1978, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta Notaris, melainkan hanya dapat menyatakan bahwa akta Notaris yang bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum, atau pembatalan atas akta Notaris tersebut hanya dapat dilakukan oleh para pihak.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 56.

diindividualisasikan.⁶⁸ Tanda tangan juga merupakan suatu pernyataan kemauan dari pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa dengan ia membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan telah menghendaki agar tulisan tersebut dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.⁶⁹

Definisi tersebut juga merupakan suatu anggapan bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus terbubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Merujuk pada *American Bar Association* (ABA), tanda tangan dapat berupa tanda apapun yang bertujuan untuk memberikan persetujuan serta otentifikasi atas suatu dokumen tersebut.⁷⁰

Pengertian tanda tangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).⁷¹ Merujuk pada pengertian tersebut, pengertian tanda tangan belum tentu merupakan suatu tanda tangan secara "tertulis" melainkan justru terhadap suatu penandaan, dimana tanda tersebut merujuk pada tanda tangan itu.

4.2. Pengertian Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Subjek hukum dalam hal ini penanda tangan terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Hal tersebut mencakup anggapan bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis,

⁶⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 220

⁶⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 473

⁷⁰ Information Security Committee, Section of Science & Technology – America Bar Association, *Digital Signature Guideliness*, American Bar Association, United States, 1996, hlm.4

⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/tanda%20tangan> pada 15 Maret 2021 pukul 21.52

wajib dicantumkan tanda tangan dari pihak yang bersangkutan. Tanda Tangan Elektronik merupakan sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang dalam penggunaannya bergantung pada kunci publik (*public key*) yang merupakan pasangannya. Menurut Julius Indra Dwiparyo, tanda tangan elektronik merupakan sebuah identitas yang bersifat elektronik dengan fungsi sebagai tanda persetujuan atas kewajiban-kewajiban yang melekat pada suatu akta elektronik.⁷²

Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*) bukanlah tanda tangan yang biasa dicantumkan di atas kertas sebagaimana umumnya suatu tanda tangan, melainkan diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan *message digest* atau *hash*, yakni *mathematical summary* dokumen yang selanjutnya dikirimkan melalui *cyberspace*.⁷³ Pada prinsipnya, tanda tangan elektronik berkenaan dengan jaminan terhadap *message integrity* yang menjamin bahwa pengirim pesan (*sender*) merupakan benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab atas pesannya. Hal ini berbeda dengan tanda tangan konvensional yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas suatu substansi pesan atau dokumen. Tanda tangan digital merupakan sebuah data yang berkaitan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.⁷⁴ Jika merujuk pada pengaturan di tingkat internasional, saat ini diatur dalam Pasal 7 UNICITRAL Model Law (*The United Nations Comissions on International Trade Law*). UNICITRAL merupakan organisasi internasional yang pertama kali membahas terkait perkembangan telematika informatika serta dampaknya terhadap perkembangan teknologi.

4.3. Tujuan, Sifat dan Manfaat dari *Digital Signature*

⁷² Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, diakses dari www.legalitas.org

⁷³ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 20.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 21

Tujuan daripada penggunaan Tanda Tangan Digital atau *Digital Signature* dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian atas otentisitas daripada suatu dokumen;
2. Untuk menyetujui dan menerima isi dari suatu dokumen secara meyakinkan.

Kemudian, berkenaan dengan sifat dari *digital signature* adalah sebagai berikut:

1. Aman (*secured*)
2. Autentik (*authentic*)
3. Konfidensialitas / Rahasia (*confidentiality*)
4. Interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa.
5. Keabsahan hanya terhadap dokumen tersebut atau salinan yang sama persis.
6. Dapat diperiksa dengan mudah
7. Divisibilitas, berkenaan dengan praktik transaksi baik terhadap yang berskala besar ataupun kecil.

Sedangkan, manfaat dari *Digital Signature* akan menyebabkan suatu data elektronik yang dikirimkan melalui jaringan terbuka (*open network*) menjadi terjamin, sehingga dapat dijabarkan berkenaan manfaat dari *digital signature* adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Keaslian (*Authenticity*)

Penggunaan *digital signature* terhadap data elektronik yang hendak dikirimkan akan dapat atau bisa ditunjukkan dari mana sesungguhnya asal data-data elektronik tersebut. Jaminan atas integritas data elektronik tersebut bisa terjadi karena dari keberadaan *digital certificate*. Perolehan atas *Digital Certificate* didasarkan pada aplikasi terhadap *Certification Authority* oleh *user*. *Digital Certificate* sendiri berisi informasi mengenai *user* yang antara lain memuat:

- a. Identitas;
- b. Kedudukan hukum;

⁷⁵ Joan Venzka Tahapary, *Keabsahan Tanda Tangan Digital Sebagai Alat Bukti*, Tesis, FH UI, 2011, hlm.18

c. Kewenangan;

d. Status dari pengguna.

Digital Certificate memiliki berbagai tingkatan yang menentukan berapa besar kewenangan yang dimiliki oleh *user* atau pengguna. Sebagai contoh dari kualifikasi ini adalah jika suatu perusahaan melakukan suatu perbuatan hukum, maka pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan tersebut adalah direksi. Maka apabila suatu perusahaan hendak melakukan suatu perbuatan hukum tersebut, maka *digital certificate* yang digunakan adalah *digital certificate* yang dimiliki oleh direksi perusahaan tersebut.

Sehingga keberadaan daripada *digital certificate* ini akan memberikan keyakinan terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan pemegang *digital certificate* tersebut bahwa suatu pesan adalah benar berasal dari *user* yang bersangkutan.

2. Integritas (*Integrity*)

Dalam pengaplikasian *digital signature* pada pesan atau data elektronik yang dikirimkan akan menjamin bahwa pesan atau data elektronik tersebut tidak mengalami modifikasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Integritas ini berhubungan dengan keutuhan daripada suatu data yang dikirimkan. User daripada penerima pesan atau data akan merasa yakin apakah pesan yang diterimanya sama dengan pesan yang dikirimkan. User tersebut akan merasa yakin bahwa data tersebut tidak dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman dan penyimpanan. Jaminan atas *authenticity* ini dapat dilihat dari adanya *hash function* dalam sistem *digital signature*, yang dimana *recipient* dapat melakukan perbandingan terhadap *hash value*. Jika *hash value* tersebut sesuai, maka dapat dipastikan bahwa data tersebut autentik. Sebaliknya jika *hash value* tersebut berbeda, maka patut dicurigai dan dapat pula disimpulkan bahwa *recipient* telah menerima data yang dimodifikasi.

3. Tidak dapat disangkal keberadaannya (*Non-Repudiation*)

Non-Repudiation ini timbul dari keberadaan *digital signature* yang menggunakan enkripsi asimetris (*asymmetric encryption*). Enkripsi ini melibatkan keberadaan daripada *private key* dan *public key*. Bahwa suatu pesan atau data

yang telah dienkripsi dengan menggunakan *private key*, maka hanya dapat dibuka atau didekripsi menggunakan *public key* dari *sender*. Sehingga apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh *sender* dengan menggunakan *private key*-nya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan daripada pesan tersebut, karena telah terbukti bahwa pesan tersebut didekripsi dengan *public key* si pengirim. Sehingga keutuhan dari pesan atau data tersebut dapat dilihat dari keberadaan *hash function*, dengan catatan bahwa data tersebut akan dimasukkan ke dalam *digital envelope*.

Non-repudiation ini merupakan hal penting bagi transaksi elektronik, karena suatu pesan atau data yang berhubungan dengan orang yang mengirim (*sender*) tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan suatu data atau pesan. Ia juga tidak dapat menyangkal isi daripada pesan atau data yang telah dikirimnya tersebut.

4. Konfidensialitas (*Confidentiality*)

Suatu data elektronik memiliki sifat rahasia atau *confidential*, sehingga tidak semua orang memiliki akses untuk mengetahui isi daripada data tersebut yang telah dimasukkan ke dalam *digital envelope*. Keberadaan dari *digital envelope* juga termasuk bagian yang integral dari penerapan *digital signature* yang menyebabkan suatu data elektronik yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh *user* yang berhak dan memiliki akses. Tingkat kerahasiaan dari suatu data elektronik yang telah dienkripsi ini dapat dilihat dari panjang kunci atau *key* yang digunakan untuk melakukan enkripsi.

4.4. Pembuatan dan Verifikasi *Digital Signature*

Dalam menandatangani suatu dokumen atas suatu informasi elektronik, terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut.⁷⁶

1. Penandatanganan harus melimitasi terlebih dahulu terhadap batasan-batasan informasi yang ingin ditandatangani

⁷⁶ Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm.66

2. Lalu dengan penggunaan *software* untuk melakukan fungsi *hash*, dilakukanlah pemadatan pesan atau *digest*

3. Substansi inti dari pesan tersebut kemudian akan dienkripsi menggunakan *private key* dari si penandatangan sehingga akan menghasilkan suatu tanda tangan elektronik (*digital signature*)

4. Kemudian *digital signature* tersebut dikirimkan bersamaan dengan pesan atau dokumen elektronik yang akan dikirimkan. Hal tersebut melekat dalam dokumen atau informasi elektronik itu sendiri (*fixed*) ataupun dikirimkan sebagai suatu elemen data terpisah yang tetap merupakan satu pertautan yang tidak terpisahkan, terasosiasi atau terhubung secara logis dengan pesan atau informasi yang dikirimkan itu sendiri.

Digital signature akan bersifat unik karena hanya dapat terbuka dengan pasangan kuncinya satu sama lain (*private key* dan *public key*) sehingga keberadaannya menjadi suatu ukuran atau metode pengamanan dari pengiriman informasi itu sendiri, dari pihak *sender* ke pihak *receiver*.

Jika suatu pesan atau informasi elektronik disampaikan dengan *public key* milik penerima, maka hanya si penerima yang dapat membukanya. Di sisi lain, terhadap pesan yang telah dikunci oleh *private key* milik pengirim, maka jika pihak penerima membuka dengan *public key* milik pengirim, hal tersebut diartikan mengautentikasi bahwa pengirim adalah pihak yang bertanggung jawab atas pesan atau informasi elektronik yang dikirimkannya tersebut. Sehingga dengan kata lain, pengirim atau *sender* tidak dapat menyangkal atas pesan yang telah ia kirimkan tersebut, kecuali jika *sender* dapat membuktikan bahwa sistem penandatangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, setelah suatu pesan atau informasi elektronik yang telah dienkripsi dikirimkan kepada pihak yang ingin dituju oleh *sender*, maka pihak yang menerima pesan tersebut harus melakukan verifikasi atas pesan atau informasi elektronik beserta tanda tangan elektroniknya. Proses verifikasi *digital signature* ini merupakan proses pemeriksaan yang mengacu pada pesan atau informasi elektronik asli yang dikirimkan.

Dengan menggunakan *public key*, dapat dilakukan suatu proses dekripsi (*decrypt*) terhadap *digital signature* yang diterima oleh *receiver*, yang hasilnya diperoleh suatu inti dari pesan atau informasi elektronik tersebut yang kemudian dengan fungsi *hash* yang sama, inti dari pesan tersebut akan diolah kembali ke dalam bentuk orisinalnya. Lalu kedua pesan tersebut akan dibandingkan satu sama lain. Jika informasi tersebut tidak berubah atau sama persis, maka dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut aman dalam pengirimannya dan mengikat para pihak. Dan juga, apabila didapati pesan tersebut telah berubah dari pesan aslinya, maka pesan tersebut akan dianggap tidak aman dan tidak mengikat para pihak.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis keabsahan penggunaan *Digital Signature* terhadap Akta Notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia

1. Analisis keabsahan *Digital Signature* berdasarkan pendekatan pengaturan di Eropa dan Indonesia

1.1. Pendekatan Pengaturan Tanda Tangan Digital di Eropa

i. *Minimalist Approach*

Pendekatan ini diperkenalkan oleh UNCITRAL *Model Law of E-Commerce* (1996) dan UNCITRAL *Model Law on Electronic Signatures* (2001) dengan menganut asas teknologi netral. Model pendekatan ini telah diikuti oleh banyak negara yang dimana prinsipnya adalah sistem hukum diharapkan dapat mengakomodasi segala jenis teknologi dalam penyelenggaraan tanda tangan elektronik. Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan minimalis karena memberikan pengakuan hukum dengan standar minimum untuk dapat mengakui status hukum terhadap tanda tangan elektronik. Yang lebih berorientasi pada persyaratan fungsional kerja dan metode autentisitas bukanlah kepada penyebutan terhadap teknologi tertentu.

Rumusan pengaturan mengenai *Digital Signature* berdasarkan UNCITRAL dapat dibandingkan antara UNCITRAL E-Commerce (1996) dengan UNCITRAL E-Signatures (2001), dengan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perbandingan Rumusan E-Signature dalam UNCITRAL *Model Law*

UNCITRAL <i>E-commerce</i> (1996)	UNCITRAL <i>E-Signatures</i> (2001)
<p>Article 7. Signature</p> <p>(1) <i>Where the law requires signature of a person, that requirement is met in relation to a data message if:</i></p> <p>(a) <i>a method is used to identify that person and to indicate that person's approval of the information contained in the data message; and</i></p> <p>(b) <i>that method is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement.</i></p> <p>(2) <i>Paragraph (1) applies whether the requirement therein is in the form of an obligation or whether the law simply provides consequences for the absence of a signature.</i></p> <p>(3) <i>The provisions of this article do not apply to the following: [...].</i></p>	<p>Article 6. <i>Compliance with a requirement for a signature</i></p>

Berdasarkan pendekatan minimalis ini, suatu *digital signature* dapat dianggap setara dengan tanda tangan basah di atas kertas atau tanda tangan konvensional, dengan ketentuan bahwa teknologi yang digunakan dapat dengan bentuk apa saja

sepanjang berfungsi sebagai tanda tangan (*integrity & authenticity*), di samping adanya persyaratan tertentu atas syarat keandalan teknologi.

Ketentuan dalam *UNCITRAL Model Law* menekankan pada dua fungsi utama dari *digital signature*, yakni (1) untuk mengidentifikasi sehubungan dengan informasi yang ditandatangani dari proses penandatanganan; dan (2) untuk menunjukkan maksud (*intention*) dari pihak yang melakukan tanda tangan yang berhubungan dengan informasi yang ia tandatangi. Tiap teknologi yang menjalankan kedua fungsi secara elektronik tersebut wajib sesuai dengan persyaratan minimal agar dapat diakui sebagai suatu tanda tangan. Dalam *Model Law*, tidak disebutkan suatu jenis teknologi tertentu karena pada pokoknya bahwa dapat diterapkan pada komunikasi dan dapat melakukan penyimpanan segala jenis informasi. Asas netral teknologi ini menjadi penting mengingat kecepatan perkembangan teknologi harus dapat diakomodasi oleh undang-undang yang juga mampu menampung perkembangan di masa depan. Sehingga, undang-undang yang mengadopsi *Model Law* ini bersifat hati-hati dan menghindari referensi untuk penggunaan metode teknis tertentu dalam melakukan transmisi atau penyimpanan informasi. Hal ini telah diakomodasi ke dalam sistem hukum banyak negara sebagai suatu prinsip umum.

Asas netral teknologi juga memberikan keunggulan pada kebebasan daripada para pihak untuk memilih teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Para pihak dibebankan tanggung jawab untuk kemudian dapat menentukan tingkat keamanan yang memenuhi kebutuhan komunikasi mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk menghindari kompleksitas teknologi yang berlebihan serta biaya yang tinggi.

Model Law tentu bukan merupakan suatu kesepakatan global. Dengan demikian, pada perkembangannya kemudian hal tersebut diperkuat dengan lahirnya *the United Nations Electronic Communications Convention* (ECC), yang menegaskan bahwa suatu komunikasi elektronik dapat mendapatkan pengakuan hukum atau tidak dapat ditampilkan hanyalah sebagai dengan alasan semata-mata bahwa bentuknya yang elektronik.

Merujuk pada ECC, transaksi yang menggunakan media elektronik untuk membuat kontrak internasional, berdasarkan *article 9* ECC, tidak perlu mempersyaratkan dalam suatu bentuk baku tertentu (*particular form*). Suatu transaksi

selama ini dilakukan dengan menggunakan media kertas sebagaimana syarat konvensional yang dipenuhi berupa (1) tertulis (*written*), (2) bertanda tangan (*signed*) dan (3) asli (*original*). Oleh karena itu, dalam penerapan transaksi yang menggunakan media elektronik perlu persamaan secara fungsional terhadap ketiga syarat tersebut.⁷⁷

Syarat konvensional dalam suatu transaksi yang menggunakan media kertas adalah harus dilakukan tertulis, berdasarkan *article 9 section (2) ECC*, persyaratan tersebut dapat terpenuhi oleh suatu komunikasi elektronik, jika informasi elektronik tersebut dapat diakses kembali (*accessible*) sehingga dapat digunakan bagi referensi selanjutnya (*usable for subsequent reference*).⁷⁸

Selanjutnya, syarat kedua adalah suatu transaksi mempersyaratkan dilakukan secara "bertanda tangan". Berdasarkan *article 9 section (3) ECC*, syarat tersebut dapat terpenuhi oleh suatu komunikasi elektronik, jika terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasi pihak serta mengindikasikan adanya persetujuan para pihak pada informasi elektronik yang dikomunikasikan tersebut.⁷⁹ Metode tersebut, salah satunya adalah:

- a. Dapat dipercaya sebagaimana tujuan dari pemanfaatannya (*as reliable as appropriate for the purpose*)
- b. Dapat terbukti secara faktual (*proven in fact*).

Terakhir, berkaitan dengan syarat bahwa suatu transaksi harus "asli", berdasarkan *article 9 section (5) ECC*, persyaratan tersebut dapat terpenuhi oleh komunikasi elektronik, jika terdapat suatu jaminan kepercayaan (*reliable assurance*) atas keutuhan informasi yang dikomunikasikan tersebut, jaminan tersebut sejak bentuk awal pembuatannya (*first generated*) hingga bentuk akhirnya (*final form*) atau sebaliknya. Dan, jika dibutuhkan ketersediaannya, informasi elektronik tersebut dapat ditunjukkan kepada pihak yang ditujunya.⁸⁰

Suatu undang-undang yang mengadopsi pendekatan minimalis yang juga menganut prinsip teknologi netral berkonsekuensi terhadap status dan keberadaan suatu tanda tangan elektronik (*digital signature*). Berkaitan dengan pembuktian,

⁷⁷ Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm. 76.

⁷⁸ *Article 9 Section (2) the United Nations Electronic Communications Convention*

⁷⁹ *Article 9 Section (3) the United Nations Electronic Communications Convention*

⁸⁰ *Article 9 Section (5) the United Nations Electronic Communications Convention*

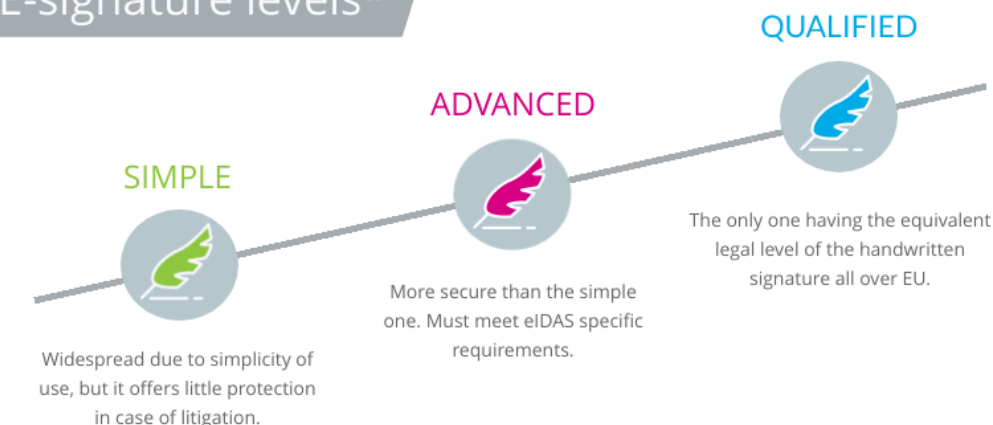
apakah suatu *digital signature* tersebut telah setara secara fungsional, akan tergantung pada pemahaman hakim, arbiter atau otoritas publik yang pada umumnya dengan penerapan "uji kepatutan reliabilitas" (*appropriate reliability test*). Dalam uji ini, seluruh jenis *digital signature* yang telah memenuhi persyaratan akan dianggap sah sepanjang syarat fungsionalnya terpenuhi. Sehingga, dengan kata lain penerapan uji reliabilitas tersebut merupakan sebuah perwujudan daripada prinsip netral teknologi.

ii. *Two-Tiered Approach*

Pendekatan ini dianut oleh negara-negara yang termasuk ke dalam Komunitas Eropa yang pada khususnya dengan adanya *Directive 1999/93/EC* tentang *Electronic Signatures*. Jika suatu undang-undang mengadopsi pendekatan ini, maka undang-undang tersebut akan menetapkan adanya ambang rendah persyaratan terhadap metode autentikasi elektronik dan status hukum minimum tertentu serta adanya suatu akibat hukum yang lebih besar untuk metode autentikasi elektronik tertentu yang lebih tinggi (biasa disebut seperti "*advanced*" atau "*qualified*").⁸¹ Pada intinya, setidaknya terdapat tiga macam pembobotan, yaitu: (1) tingkat yang biasa (*ordinary*), (2) tingkatan yang lebih terakreditasi (*advanced*) dan (3) tingkatan yang paling ketat dan kompleks dari seluruh macam *digital signature*, secara teknis tanda tangan ini terkualifikasi oleh *Qualified Trust Service Provider* (*qualified*).

⁸¹<https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2015/08/new-eu-regulation-for-electronic-signatures/>

E-signature levels*



*According to eIDAS regulation that sets the standards and verification mechanisms for electronic signature and other trust services on European Union's market.

Gambar 3.1 Kualifikasi *E-Signatures*⁸²

Tanda tangan elektronik pada tingkatan dasar tetap diadopsi oleh undang-undang dengan sistem kesetaraan-fungsional (*functional equivalent approach*) dengan tanda tangan konvensional. Hal ini juga didasarkan pada asas netral teknologi. Namun undang-undang juga mengadopsi keberadaan tingkatan tanda tangan yang lebih tinggi dengan didasari atas suatu asumsi dasar bahwa suatu sistem telah dianggap berjalan dengan baik, kecuali terbukti sebaliknya atau disebut sebagai "*rebuttable presumption*".

Dalam praktiknya, *two-tiered approach* ini biasa digunakan dalam yurisdiksi yang menganggap pentingnya penyelesaian permasalahan terhadap persyaratan teknologi tertentu dalam penerapan *digital signature* dalam undang-undang mereka, tetapi di saat yang sama juga tetap memberikan ruang bagi perkembangan teknologi *digital signatures* di kemudian hari. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dengan kepastian hukum yang berkaitan dengan penerapan tanda tangan elektronik. Dengan diberikannya kebebasan kepada para pihak untuk memutuskan pilihan persyaratan teknologi *digital signatures* dalam transaksi mereka akan memberikan pertimbangan biaya serta kenyamanan dalam penggunaan metode autentifikasi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak.

⁸² <https://www.luxtrust.com/e-signature-levels-and-legal-value/>

Penerapan *digital signature* dalam konteks transaksi komersial lintas negara yang membutuhkan *Cross-border Certification* memerlukan kebijakan penerapan

Tanda Tangan Elektronik yang mengadopsi pendekatan *two-tier* dengan perjanjian/kontrak mengenai penggunaan dan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dengan tujuan terhadap kepastian bahwa metode autentikasi yang digunakan tidak berbenturan dengan hukum nasional para pihak.

Penerapan EU Directive 1999/93/EC saat ini telah digantikan dengan EU Regulation No. 910/2014/EU on *Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market* yang selanjutnya disebut sebagai "e-IDAS". Perubahan dari kerangka peraturan dalam EU yang sebelumnya dituangkan dalam bentuk "*Directive*" diubah menjadi "*Regulation*" memuat implikasi yang fundamental. Dalam penerapan EU *Directive* negara-negara anggota bebas dalam menginterpretasikan penerapannya dalam hukum nasionalnya masing-masing, sedangkan dalam EU *Regulation* memuat kekuatan hukum mengikat yang berlaku bagi seluruh negara-negara anggota.

Inti dari perubahan pengaturan terkait Tanda Tangan Elektronik dalam e-IDAS adalah diterapkannya Tanda Tangan Elektronik yang lebih mumpuni dengan memberikan tiga tingkatan definisi Tanda Tangan Elektronik yang berbeda, ketiga tingkatan tersebut meliputi: tanda tangan elektronik yang sederhana (*simple*); tanda tangan elektronik tingkat tinggi (*Advanced Electronic Signatures*); dan tanda tangan elektronik terqualifikasi (*Qualified Electronic Signatures*).⁸³ Selanjutnya, berdasarkan *article 25* e-IDAS, telah diatur bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki akibat hukum yang sama dan setara dengan tanda tangan tertulis (*handwritten signature*). Hal tersebut dapat diwujudkan ketika Tanda Tangan Elektronik tersebut dibuat dengan alat pembuat Tanda Tangan Elektronik yang berkualitas dengan berdasarkan pada sertifikasi kualifikasi Tanda Tangan Elektronik (*qualified electronic signature certificate*). Pada EU *Directive* dijamin keabsahan dari Tanda Tangan Elektronik, tetapi pada e-IDAS diberikan kepastian keamanan dari transaksi elektronik dengan berbagai otorisasi layanan kepercayaan elektronik. Otorisasi layanan kepercayaan tersebut

⁸³ Article 25, EU Regulation No. 910/2014/EU on *Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market*

meliputi *electronic signatures, electronic certification, electronic seals, electronic time stamps, electronic registered delivery services* dan *website authentication services*.⁸⁴

1.2. Pendekatan Pengaturan Tanda Tangan Digital di Indonesia

i. Pengaturan Tanda Tangan Digital dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

Ketentuan mengenai penerapan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didapati dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang mengatur tentang penandatanganan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan badan hukum secara elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan secara elektronik merupakan tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keautentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.⁸⁵

Jika dicermati dalam penjelasan Pasal 10 ayat (6) tersebut, dapat dilihat bahwa paradigma yang digunakan dalam pengertian tanda tangan elektronik hanya bergantung pada bentuk virtual suatu tanda tangan saja. Maka dengan kata lain hanyalah berbentuk *scanned* dari tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Hal ini jelas tidak merepresentasikan secara tepat terhadap apa yang dimaksud dari suatu tanda tangan elektronik yang sesungguhnya, yakni sebagai suatu cara ataupun metode teknis untuk melakukan verifikasi dan autentikasi terhadap validitas dari suatu Informasi Elektronik, terlebih sebagai Tanda Tangan Digital yang merupakan suatu Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi dan diproses menggunakan sistem elektronik yang aman, andal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tanda Tangan Digital, terbuka pula kemungkinan terhadap pembuatan risalah rapat secara elektronik dalam Pasal 77 UU PT, tetapi hal tersebut nyatanya sulit untuk mendapatkan bentuk akta notariil jika

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Penjelasan Pasal 10 ayat (6) UU PT

Undang-Undang Jabatan Notaris belum membuka peluang tersebut. Sehingga, risalah rapat hanya terbatas terhadap substansi yang tidak memiliki akibat pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- ii. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai pengertian dokumen elektronik, yakni "setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, suatu dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan Tanda Tangan Elektronik, diatur pula pengertian Tanda Tangan Elektronik dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu "tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi." Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Tanda tangan elektronik meliputi:

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:⁸⁶

⁸⁶ Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PP PSTE

1) Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(3) PP PSTE;

2) Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan

3) Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik⁸⁷

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) PP PSTE, Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi terhadap:

a. Identitas penanda tangan; dan

b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik

Selanjutnya, berkaitan dengan persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) PP PSTE harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang menunjukkan maksud serta tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.⁸⁸

Sehingga tanda tangan elektronik lazimnya dilakukan terhadap transaksi elektronik. Transaksi elektronik sendiri dalam pengertiannya merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁸⁹

Berkenaan dengan keabsahan dari suatu tanda tangan elektronik, berdasarkan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

⁸⁷ Pasal 60 ayat (2) huruf b dan ayat (4) PP PSTE

⁸⁸ Pasal 62 ayat (4) PP PSTE

⁸⁹ Pasal 1 angka 2 UU ITE

b. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan

e. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Persyaratan tersebut adalah batas minimum yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pihak untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana penerapan asas netral teknologi. Dalam Alinea Pertama Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU ITE, telah ditegaskan pula bahwa UU ITE dan perubahannya telah memberikan pengakuan bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik mempunyai kedudukan yang sama dengan tanda tangan konvensional pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Maka, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 11 UU ITE dan Pasal 59 PP PSTE.

2. Analisis keabsahan penggunaan Digital Signature terhadap Akta Notaris

2.1. Akta relaas

Penggunaan *digital signature* terhadap akta *relaas* dimungkinkan dalam pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS) yang merupakan salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam ketentuan Pasal 77 UU PT membuka kemungkinan pembuatan risalah rapat secara elektronik. Hal ini disebabkan dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.

Tabel 3.2

Perumusan RUPS secara elektronik dalam UU PT

UU PT	PENJELASAN
<p>Pasal 77</p> <p>(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.</p> <p>(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.</p> <p>(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p>

harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah **disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik**

Jika merujuk pada rumusan dalam Pasal 77 UU PT tersebut, dapat dilihat bahwa pembuatan risalah rapat secara elektronik memungkinkan jika terdapat kepastian bahwa hal tersebut berlangsung secara "daring" dan dalam waktu yang sebenarnya (*real time*) yang di mana para pihak dapat saling mendengar dan melihat serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam ketentuan ini tidak berlaku prinsip netral teknologi karena tidak seluruh teknologi dapat digunakan melainkan hanya dalam konteks telekomunikasi pandang-dengar (*video-conference*) bukan dalam telekomunikasi secara suara saja (*telephone-conference*).

Hal tersebut bukan merupakan penerapan yang tepat, jika merujuk pada pendekatan pola pengaturan di Eropa yang telah dibahas sebelumnya, penerapan prinsip netral teknologi jauh lebih tepat, mengingat hal yang terpenting adalah adanya jaminan validitas bahwa pelaksanaan *teleconference* tersebut dilakukan sebagaimana mestinya daripada mengatur terhadap pembatasan teknologi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan yang dilakukan oleh pimpinan Perseroan Terbatas tersebut bahwa proses *teleconference* yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan *riil* bukan suatu hasil dari rekayasa. Hal ini dapat diterapkan dengan adanya pernyataan dari Penyedia Jasa Telekomunikasi (*Telecommunication Service Provider*) yang digunakan.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam konteks penerapan Tanda Tangan Digital dalam pembuatan risalah rapat berupa akta notariil, merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, hal tersebut dapat dikatakan belum dimungkinkan karena disyaratkan adanya suatu kehadiran secara fisik dari para pihak yang menghadap notaris. Namun, menurut penulis hal tersebut masih memungkinkan karena masih terbuka kemungkinan bahwa yang menjadi terbatas hanya atas akta yang dibuat di hadapan notaris (*akta partij*) bukan akta yang dibuat oleh notaris (*akta relaas*). Dapat dikatakan pula bahwa dibutuhkan adanya jaminan pernyataan dari pihak penghadap yang bersangkutan dalam meminta risalah rapat umum pemegang



saham (RUPS) untuk dinotariatkan, selayaknya notaris berkenan untuk membuatkan akta secara luring.

Menurut penulis, dapat pula dibuka kemungkinan tafsir perluasan makna dari maksud "kehadiran secara fisik", dimana "kehadiran secara elektronik" memiliki persamaan dengan kehadiran fisik, atau sekurang-kurangnya memenuhi syarat terhadap suatu kehadiran secara fisis. Alasan utama dari tafsir ini adalah karena ilmu elektronik dan sistem elektronik merupakan bagian dari ilmu fisik yang kehadirannya juga dapat dirasakan sebagaimana kehadiran fisik oleh masyarakat. Dewasa ini, setiap orang dapat dengan mudah membedakan suatu kehadiran berdasarkan "rekaman" maupun yang "realtime".

Dengan kata lain jika kendala dalam penerapan *digital signature* terhadap akta notaris adalah terbatas kepada kehadiran secara fisik badan penghadap, maka dengan adanya jaminan pernyataan dari penghadap yang bersangkutan dalam meminta risalah rapat untuk dinotariatkan, maka selayaknya notaris dapat membuatkan akta tersebut. Berkaitan dengan penggunaan *digital signature* dalam risalah RUPS, sebagaimana pembuatannya perlu adanya jaminan pernyataan dari penandatanganan yang bersangkutan dalam pembuatan akta tersebut.

Jaminan pernyataan tersebut dapat diperoleh dengan adanya sertifikasi terhadap *digital signature* itu sendiri. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, tanda tangan elektronik harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Sebagai contoh, sertifikasi terhadap *digital signature* yang dilakukan oleh PrivyID yang sudah terkandung informasi pemilik tanda tangan seperti nomor induk kependudukan, foto diri, hingga golongan darah dari penandatanganan. Sehingga sertifikat digital ini dapat digunakan untuk membuktikan apakah tanda tangan diital tersebut palsu atau asli, serta apakah ada perubahan pada dokumen tersebut.⁹⁰

Dalam konteks sertifikasi *digital signature* yang dilakukan oleh PrivyID sendiri telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara tanda tangan digital. Maka, dapat dikatakan bahwa tanda tangan

⁹⁰ <https://blog.privacy.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>

digital tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan UU ITE dan PP PSTE.

Maka, dengan adanya jaminan keabsahan *digital signature* tersebut sebagaimana Pasal 59 ayat (3) PP PSTE yang dijustifikasi dengan penerapan sertifikasi elektronik atau *cyber notary* berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUNJN serta pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana Pasal 77 UU PT, dapat disimpulkan bahwa penerapan *digital signature* terhadap akta *relas* dimungkinkan selama memenuhi ketentuan pasal-pasal *a quo*. Tetapi tetap diperlukan adanya perubahan terhadap UU Jabatan Notaris dan UU Perseroan Terbatas agar dapat mengakomodir pembuatan *akta relas* yang ditandatangani dengan *digital signature*.

2.2. Akta *partij*

Penerapan *digital signature* terhadap akta *partij* sejauh ini belum dimungkinkan, karena berdasarkan bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan "Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi." Menegaskan bahwa notaris harus melihat dan mendengar secara langsung dalam penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris itu sendiri. Hal tersebut juga dijustifikasi pada bagian penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan "Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi." Jika merujuk pada bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu:⁹¹

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

⁹¹ Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga

memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Apabila kedepan diadakan revisi terhadap UUJN, maka dapat dimungkinkan untuk menggunakan *digital signature* terhadap *akta partij* sebagaimana yang dilakukan terhadap *akta relaas* yang dalam hal ini dilakukan terhadap risalah RUPS dengan diberikan klausula pada akhir akta bahwa pembacaan akta dan penandatngannya dilakukan di lebih dari satu kota sesuai dengan tempat para pihak yang bersangkutan dengan menggunakan alat elektronik yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (*teleconference* dengan tanda tangan digital yang tersertifikasi). Sebagai contoh: Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Kota Bekasi dan Kota Bandung melalui *Teleconference*, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada permulaan akta ini.

Berkenaan dengan keotentikan suatu akta, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPPerdata, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik. Namun, dalam konteks penerapan *digital signature* akan menjadi masalah karena dalam proses penandatanganan aktanya menggunakan alat-alat elektronik seperti *digital certificate* yang dilakukan melalui *teleconference*. Hal ini juga dijustifikasi oleh Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebut bahwa dalam penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

Berkenaan dengan *digital signature* juga dibutuhkan 2 tahap yang pembentukannya menggunakan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital yang menjuadi suatu proses pengecekan *digital signature* dengan mengacu pada dokumen asli serta kunci publik yang telah diberikan, sehingga dapat dipastikan apakah tanda

tangan tersebut ditujukan untuk dokumen yang sama sesuai dengan kunci privat yang digunakan. Apabila kedua proses tersebut telah terpenuhi, maka suatu tanda tangan dapat disamakan dengan tanda tangan secara konvensional. Ketika suatu tanda tangan digital dibubuhkan pada dokumen elektronik, maka penandatanganan tersebut dianggap mengakui semua yang ditulisnya. Maka, tanda tangan digital memiliki sifat “*one signature document*” yang apabila terjadi perubahan sedikit saja pada dokumen elektronik tersebut maka tanda tangan digitalnya akan menjadi tidak valid.

Sehingga hal ini diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang utamanya berkaitan dengan proses pembuatan akta dalam arti umum dan pembuatan akta dengan penggunaan *digital signature* di dalamnya pada khususnya. Selain itu juga dibutuhkan adanya penjabaran terhadap pengertian tentang sertifikasi dengan menggunakan *cyber notary*, hal ini dimaksudkan agar kedepan notaris dalam melaksanakan jabatannya dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi tanpa harus melanggar undang-undang yang mengatur pelaksanaan jabatannya ataupun undang-undang lain yang berkaitan.

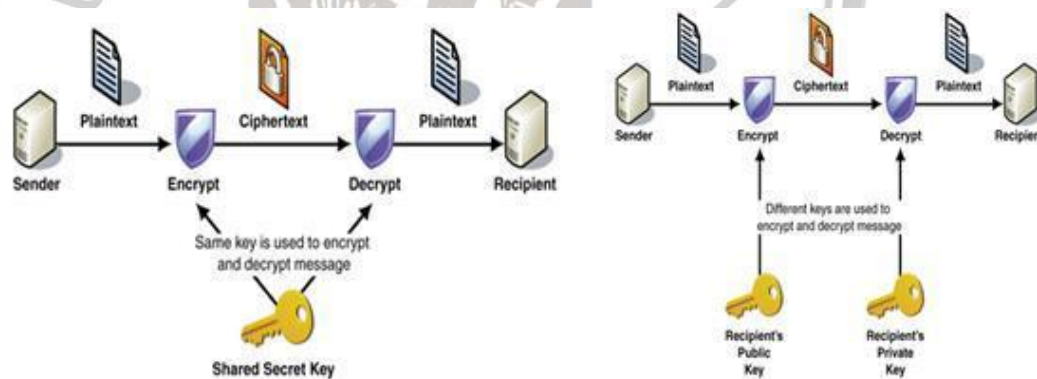
Selanjutnya berkaitan dengan Sistem Elektronik yang menjamin keabsahan penggunaan *Digital signature*, sesuai dengan uraian pada sub-bab sebelumnya, yaitu suatu *digital signature* dapat digunakan terhadap akta notaris dengan adanya jaminan bahwa *digital signature* tersebut memiliki keabsahan dan persamaan hukum sebagaimana tanda tangan konvensional. Hal ini perlu dikaji melalui sistem elektronik yang menjamin keabsahan tersebut.

Perlu diketahui bahwa *Digital signature* merupakan nama untuk metode autentikasi yang menggunakan aplikasi teknologi asimetris kriptografi. Sedangkan Asimetri Kriptografi sendiri merupakan sistem pengacakan suatu pesan dengan menggunakan pasangan kunci yang terdiri dari kunci privat dan kunci publik. Sehingga, Tanda Tangan Digital juga sering disebut sebagai sistem enkripsi kunci publik, yang digunakan untuk memastikan originalitas suatu pesan elektronik serta menjamin integritas substansi atas suatu pesan.

Pada praktiknya, Tanda Tangan Digital memiliki beberapa bentuk yang berbeda, seperti (1) *undeniable digital signatures*, (2) *fail stop digital signatures*, dan

(3) *blind digital signatures*. Secara teknis, *Digital signature* diciptakan dan diverifikasi dengan menggunakan algoritma kriptografi, yang merupakan suatu cabang matematika terapan (*applied mathematics*) yang terspesialisasi pada cara pengubahan atau pengacakan (*encrypt*) suatu pesan menjadi suatu bentuk pesan lain yang substansi sesungguhnya daripada pesan tersebut tidak dapat terbaca, yang kemudian dapat disusun kembali (*decrypt*) menjadi bentuk aslinya.

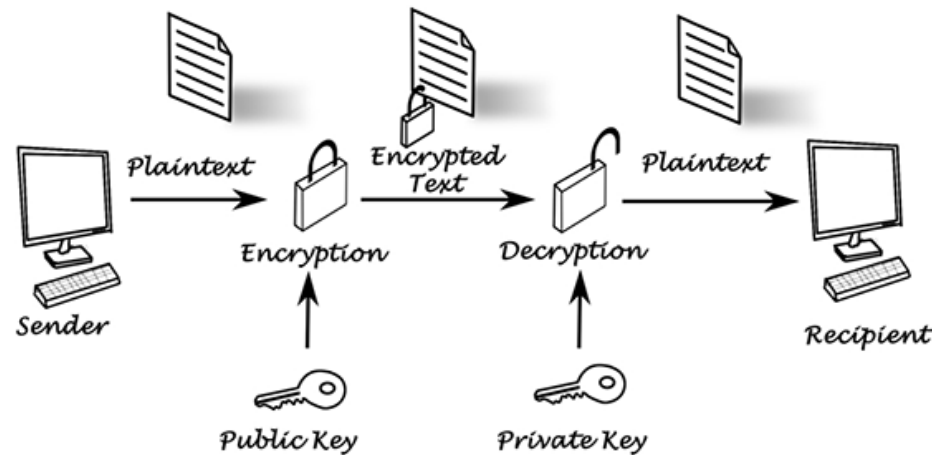
Sedangkan, enkripsi sendiri ada yang bersifat simetris dan ada pula yang bersifat asimetris. Untuk yang bersifat simetrik, hanya satu kunci yang digunakan, yaitu kunci yang digunakan untuk mengunci sama dengan yang gunakan sebagai kunci pembukanya. Sementara untuk yang bersifat asimetris, terdiri atas kunci yang berhubungan secara logis matematik, sehingga kunci yang digunakan untuk mengunci berbeda dengan kunci yang digunakan untuk membuka. Kunci yang digunakan oleh penggunanya untuk membuka disebut sebagai kunci privat, sedangkan kunci yang digunakan oleh publik untuk membuka disebut kunci publik.



Gambar 3.2 Enkripsi Simetris vs Enkripsi Asimetris

Dalam *digital signature*, digunakan apa yang dikenal sebagai kriptografi kunci publik, yang didasarkan pada penggunaan algoritma fungsional dengan tujuan menghasilkan dua kunci yang berbeda, tetapi saling terkait (sepasang kunci) secara matematis. Satu kunci digunakan untuk membuat *digital signature* yang selanjutnya dilakukan pengacakan atau mengubah data ke dalam bentuk yang sulit dipahami oleh penerimanya, sedangkan kunci komplementer lainnya digunakan untuk menerjemahkan data yang telah diacak tersebut untuk dapat memverifikasi *digital*

signature tersebut.



Gambar 3.3 Skema Enkripsi dan Dekripsi

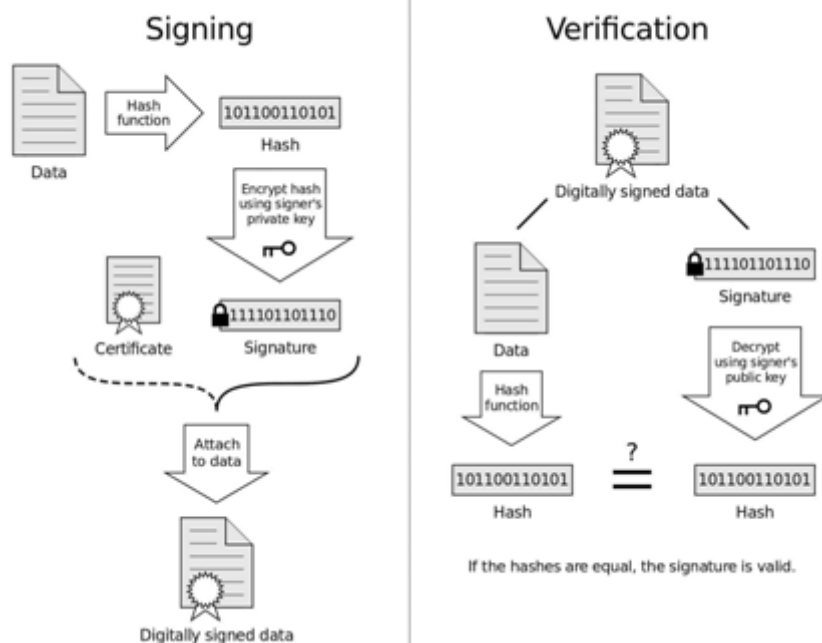
Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa enkripsi asimetris akan menghasilkan dua buah kunci yang merupakan pasangan satu dengan lainnya. Kunci yang berada pada pembuatnya disebut sebagai "*private key*", yang penggunaannya hanya dapat digunakan oleh penandatangan untuk membuat *digital signature*. Sedangkan kunci pasangan yang disediakan untuk publik yang dapat digunakan untuk verifikasi terhadap pesan yang telah diacak melalui kunci privat bagi penerimanya disebut "*public key*". Kunci publik tersebut dalam perolehannya harus dapat terjamin dengan baik terhadap masyarakat atau orang yang dituju agar dapat digunakan sebagai verifikasi penandatanganan terhadap *digital signature* yang telah dikirimkan kepadanya.

Walaupun pasangan dari kunci-kunci tersebut terkait secara matematis, tetapi jika penerapan *cryptosystem* asimetris dirancang dan diimplementasikan secara aman, dapat dikatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk memperoleh kunci publik atau kunci private tanpa pengetahuan satu sama lainnya.⁹² Pada umumnya, enkripsi dalam penggunaannya sering menggunakan algoritma yang didasarkan pada logika bilangan prima. Algoritma tersebut secara matematis akan sangat sulit bagi seseorang

⁹² Edmon Makarim, *op.cit.*, hlm.65

yang menerima *public key* untuk dapat menerobos sendiri pasangan *private key* dari kunci tersebut. Sehingga, meskipun banyak pihak yang mungkin dapat memperoleh *public key*, namun tidak berarti mereka juga memperoleh *private key*-nya, terutama dengan upaya-upaya penerobosan. Maka dapat dikatakan pula, setiap pihak hanya akan memegang satu kunci saja yang merupakan kunci pasangan dari pihak lainnya.

Digital signature bersifat unik sehingga hanya dapat dibuka dengan pasangan kuncinya satu sama lain, yakni privat dan publik. Sehingga eksistensinya menjadi ukuran dari pengamanan pengiriman suatu dokumen itu sendiri, dari pengirim ke penerima. Suatu pesan yang disampaikan melalui kunci publik penerima, maka hanya penerima saja yang dapat membukanya. Dengan kata lain, pengirim tidak dapat menghindar atau melakukan penyangkalan terhadap informasi elektronik yang dikirimkannya tersebut, kecuali jika pengirim dapat membuktikan bahwa proses sistem *digital signature* tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Gambar 3.4 Skema Verifikasi *Digital signature*

Kemudian setelah suatu informasi elektronik dikirimkan kepada pihak yang dituju, maka pihak penerima harus melakukan proses verifikasi terhadap pesan dan *digital signature* yang diterimanya. Proses verifikasi *digital signature* adalah proses

pemeriksaan yang mengacu pada informasi elektronik asli yang dikirimkan. Sehingga, dengan proses yang aman, andal dan dapat dipertanggung jawabkan tersebut bisa dijadikan dasar sebagai sistem elektronik yang menjamin keabsahan daripada suatu *digital signature*.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka *Digital signature* dapat digunakan terhadap Akta Notaris jika dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Berkenaan dengan keabsahan *Digital signature* dan penggunaannya terhadap Akta Notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa belum dapat dilakukan mengingat ketentuan dalam bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan "Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.". Dengan demikian, penggunaan *digital signature* belum memiliki keabsahan dalam Akta Notaris, walaupun penerapannya masih dimungkinkan terhadap Akta *relaas* yang dalam hal ini adalah pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Penerapan *digital signature* terhadap akta notaris juga dijustifikasi atas keabsahannya berdasarkan sistem elektronik yang menjamin keabsahan dari penggunaan *Digital signature* tersebut yang didasarkan pada sistem yang aman, andal dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun, hal tersebut juga masih sebuah kemungkinan yang perlu dipertegas oleh suatu ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundangan-undangan.

B. Analisis akibat hukum dari penggunaan Digital Signature terhadap akta notaris berdasarkan hukum positif di Indonesia

1. Peran Notaris dalam Kedaruratan dan Pandemi COVID-19

Penggunaan *digital signature* terhadap Akta Notaris dapat menjadi solusi atas permasalahan dari penyebaran wabah COVID-19 di seluruh dunia yang kini menjadi tantangan yang sulit, tak terkecuali bagi Indonesia. Penyebaran wabah yang secara geografis menyebar dengan luas mengakibatkan *World Health Organization* sebagai otoritas kesehatan dunia menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Atas diterapkannya status ini, memiliki dampak yang besar bagi seluruh aktivitas

masyarakat, sehingga setiap negara memiliki kebijakan dalam menanggulangi dan meminimalisir penyebaran wabah penyakit COVID-19.

Pemerintah Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Diseases* 2019 (COVID-19). Selain ditetapkan menjadi bencana nasional, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang ditujukan untuk meminimalisir penyebaran risiko penyebaran virus. Hal ini tertuang dalam; Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19;⁹³ dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Keseluruhan aturan tersebut mewajibkan *social distancing* dan *physical distancing* bagi seluruh aktivitas masyarakat. Termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan belajar, bekerja, dan aktivitas perniagaan.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi dengan mempertimbangkan peningkatan kasus, penyebaran, dan terjadinya transmisi lokal di daerah tersebut. Salah satu solusi untuk mengurangi kontak fisik dan meminimalisir penyebaran adalah dengan merumahkan tempat kerja. Para pekerja yang biasanya harus pergi ke kantor, kini diharuskan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH). Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

⁹³ Pada tanggal 12 Mei 2020 Perppu No. 1/2020 tersebut disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Paripurna

Kehadiran teknologi informasi yang berkembang secara pesat, membuat penyelenggaraan WFH (*Work from Home*) tidak lagi mengalami hambatan. Kehadiran pekerja bisa digantikan dengan alat elektronik, tidak terkecuali pekerjaan jasa layanan hukum, baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan, Pengacara/Advokat maupun notaris sebagai pejabat umum. Penyelenggaraan layanan jasa hukum merupakan kelompok pekerjaan yang secara teknis dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi. Baik menggunakan sistem yang dibuat sendiri maupun menggunakan sistem aplikasi elektronik yang diselenggarakan pihak ketiga.

Pelaksanaan perbuatan hukum dengan elektronik secara legalitas telah diterima dalam sistem hukum nasional dengan dilihat dari berbagai aturan yang telah mengakui keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang secara teknis akuntabilitas sistem elektronik dapat dilihat dari segi keamanan, keandalan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sedangkan secara formil, sistem elektronik tersebut selayaknya laik operasi dan terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik yang terakhir direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Arsip); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).

Pengacara/Advokat dan Notaris sebagai layanan jasa hukum yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, dapat menyelenggarakan jasanya secara elektronik, dengan kepastian hukum akan transaksi elektronik tersebut. Sistem ini bukan hal baru bagi Pengacara/Advokat, seperti melakukan konsultasi secara daring, juga pembuatan kontrak secara elektronik. Sedangkan untuk litigasi peradilan, belum dapat sepenuhnya dilakukan secara daring. Namun sejalan dengan kondisi kedaruratan ini, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 telah mengupayakan implementasi *e-court*, yakni penyelenggaraan

proses litigasi/peradilan secara daring. Terobosan ini juga disikapi oleh Kejaksaan Agung yang menerbitkan Instruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020.

Berbagai upaya tersebut memperlihatkan adanya kesadaran untuk mereformasi diri atas kebutuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk tetap dapat melaksanakan pelayanan publik secara elektronik. Namun masih ada satu layanan jasa hukum yang tertinggal untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik, yakni notaris. Padahal, fungsi dan peran notaris masih sangat dibutuhkan masyarakat pada kondisi darurat kesehatan seperti yang terjadi. Masyarakat tetap melakukan transaksi agar perekonomian terus berjalan, dan juga banyaknya perusahaan yang harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Notaris menjadi pihak yang merasa terhambat pekerjaannya dengan anjuran WFH yang digagas oleh pemerintah sebab adanya pandangan norma 'keharusan' untuk hadir secara fisik dalam pembuatan akta. Sebagaimana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang direvisi dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Alasan lain yang menambah kekhawatiran Notaris adalah pengecualian akta notaris sebagai alat bukti yang sah. Akta yang dibuat secara elektronik berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baik secara perdata, administratif, bahkan pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

Kondisi darurat kesehatan saat ini yang juga dirasakan oleh sebagian negara di dunia, penyelenggaraan jasa notaris berbagai negara pun terdampak, namun beberapa negara telah mengeluarkan peraturan yang memberikan panduan dan legalitas penyelenggaraan jasa Notaris menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Amerika Serikat menjadi yang paling gencar dalam melakukan *Remote Authorization* atau penyelenggaraan jasa notaris dengan klien yang terkoneksi melalui sambungan audio visual secara *real time* namun berada di tempat berbeda. Juga *A/V Notarization* yang merupakan penyelenggaraan jasa Notaris yang tidak harus sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Sifatnya yang fleksibel menjadikan *A/V Notarization* pilihan praktikal, meski dari segi keandalan dan keamanan kurang dapat

dipercaya. Negara yang sudah menjalankan praktik *remote notarization* ialah negara-negara bagian yang telah memiliki peraturan perundang-undangan terkait seperti Florida, Idaho, Illionis, dan Indiana. Sedangkan negara bagian yang btidak memiliki peraturan mengenai *remote notarization*, menghimbau Notarisnya untuk menyelenggarakan jasanya dengan mekanisme *A/V notarization*, seperti New Hampshire, New York.

Sedangkan di Italia, penyelenggaraan jasa Notaris tetap beroperasi sebagaimana mestinya, telah diakomodir dalam Undang-Undang Notaris Italia Pasal 142 yang mengatur seorang Notaris untuk tetap beroperasi melayani jasanya. Instansi terkait Amerika Serikat serta Italia telah mengambil kebijakan yang memberikan legalitas terhadap penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik. Seperti kewajiban menyimpan rekaman penandatanganan atau keharusan untuk menggunakan *platform* tertentu. Yang dibutuhkan Notaris adalah diberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan jasanya secara elektronik, sebagai upaya memutar roda perekonomian dan menjaga kepentingan nasional.

2. Akibat Hukum dari penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris

Pengecualian akta notaris sebagai bukti elektronik yang termaktub dalam pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE harus dipahami secara komperhensif, termasuk secara historikal pembentukan UU ITE sebenarnya maksud pengecualian dalam pasal 5 ayat (4) huruf a dan b ialah tidak mutlak. Karena selayaknya selaras dengan dinamika teknologi yang berkembang dan dalam praktiknya akan merujuk kepada undang-undang sektoral sebagai Lex Specialis-nya. Ketentuan pengecualian Model Law on e-Commerce dalam UNCITRAL sudah tidak dicantumkan lagi. Pada akhirnya pasal pengecualian tersebut bukan merupakan larangan untuk menjalankan pekerjaannya sebagai Notaris. Dalam menyelenggarakan jasanya, tentu Notaris harus tunduk pada UUNJ, apabila berani melakukan suatu terobosan hukum, maka Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE tidak menjadi mutlak.

Persepsi bahwa pembuatan akta harus di atas kertas, padahal tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menyatakan demikian. Dalam batang tubuh UUNJ

tidak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “tertulis” ialah mekanisme pembubuhan tinta di atas media kertas. Adanya peraturan yang memberikan himbauan untuk melaksanakan *social* dan *physical distancing* dalam menjalankan pekerjaan, tidak terkecuali untuk Notaris. Demi kepentingan publik yang lebih besar, norma ‘keharusan’ pada Notaris hadir secara fisik untuk penandatanganan akta dihadapan penghadap dan saksi yang tertulis pada Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN dapat dikesampingkan dalam keadaan darurat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, diperkuat dengan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Pertemuan fisik dalam keadaan darurat seperti saat ini justru dianggap bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih besar dan utama, sehingga penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik tidak berdampak terhadap keabsahan penandatanganan suatu akta. Sehingga dalam kondisi kedaruratan seperti ini, para pemangku kepentingan akan sangat memaklumi ketidakhadiran Notaris secara fisik. Kehadiran lewat audio visual maupun *teleconference* telah dianggap sebagai kehadiran langsung, jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan dan penguatan penyelenggaraan jasa Notaris secara elektronik.

Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi yang selanjutnya menjadi Tanda Tangan Digital atau *digital signature* yang digunakan Notaris merupakan alat buktinya yang sah sehingga memenuhi kaidah keautentikan dan dapat mengamankan Notaris dari pertanggungjawaban teknis. Kehadiran tanda tangan elektronik yang tersertifikasi serta diselenggarakan Pihak Ketiga adalah suatu sistem pengamanan terhadap informasi dan komunikasi elektronik. Akta Notaris yang dibuat secara elektronik tidak akan menjadi masalah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, apabila instansi terkait mengeluarkan regulasi yang dapat menerima dan mengakui keberadaannya sebagai dasar pemenuhan kelengkapan dokumen. Akta Notaris Elektronik menjadi dasar pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik, pada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria, Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan adanya jaminan keabsahan *digital signature* sebagaimana Pasal 59 ayat (3) PP PSTE yang dijustifikasi dengan penerapan sertifikasi elektronik atau *cyber notary* berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUNJN serta pelaksanaan RUPS elektronik sebagaimana Pasal 77 UU PT, dapat disimpulkan bahwa penerapan *digital signature* terhadap akta *relaas* dimungkinkan selama memenuhi ketentuan pasal-pasal *a quo*.

Namun, di sisi lain jika Notaris menerapkan *digital signature* terhadap akta *partij*, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (9) yang menyatakan bahwa Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, jika merujuk pada bagian penjelasan dari Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan "Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi." Hal tersebut menegaskan bahwa notaris harus melihat dan mendengar secara fisik dalam penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris itu sendiri.

Sehingga akibat hukum dari penggunaan *digital signature* terhadap Akta Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sepanjang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum mengatur penerapan *digital signature* terhadap Akta Notaris, maka akta tersebut akan berkekuatan sebagai akta di bawah tangan.

3. Tanggung Jawab Hukum Notaris dan para pihak terkait dalam penggunaan *Digital signature*

Penyelenggaraan *Digital signature* adalah kegiatan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan infrastruktur. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan jasa tanda tangan digital yang efisien, aman, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia. Hal ini sangat berguna bagi berbagai sektor, baik yang sifatnya komersil, *non-profit*, dan sosial atau komunal.

Dalam praktiknya, tidak semua Penyelenggaraan *Digital signature* akan melakukan pendaftaran ataupun akreditasi di suatu negara. Sedangkan untuk mengakui kekuatan pembuktian paling sempurna adalah apabila *Digital signature* tersebut melakukan akreditasi di negara yang bersangkutan (*qualified signature*).

Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab hukum notaris dalam lingkup sebagai penyelenggara jasa kenotariatan dan pengguna *digital signature*, perlu mencermati kompleksitas hubungan hukum dari pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Setiap pihak yang melakukan perbuatan penyalahgunaan yang diancam berdasarkan ketentuan pidana memiliki tanggung jawab pidana. (contoh: pemalsuan surat, pemalsuan data, penyalahgunaan perangkat, kesaksian palsu, akses ilegal, intersepsi ilegal, interferensi data dan/atau sistem, distribusi konten digital, dan lain sebagainya).
2. Pelanggaran terhadap tindakan pembiaran yang merugikan publik, setiap instansi memberikan tanggung jawab administratif sesuai kewenangan yang dimilikinya. Kemungkinan hal besar tersebut akan mengalir sebagai gugatan perwakilan (*class action*) dari para konsumen yang dirugikan.
3. Tanggung jawab perdata merujuk pada konsep dan penerapan Perbuatan Melawan Hukum (*Tort*), yang ditentukan dalam empat elemen, yaitu: (1) adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum (*breach of duty*); (2) adanya kesalahan pelaku (secara sengaja dan kelalaian); (3) merugikan pihak lain (*damages*); dan (4) hubungan kausalitas antar kerugian dengan perbuatan tersebut.

Tabel 3.3
Perumusan penerapan Perbuatan Melawan Hukum (*Tort*)⁹⁴

No	Variabel	Perbuatan Melanggar Hukum (<i>Unlawful Art</i>)	<i>Tort</i>
1.	Pengertian	Pasal 1365 KUHP data: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti rugi itu.	<i>Tort is wrong. Tort law protects a variety of injuries and provide remedies for them</i>
2.	Kualifikasi	Kualifikasinya hanya berdasarkan atas kesengajaan atau karena kelalaian, tetapi tidak terdapat perbedaan konsekuensinya secara tegas.	Kualifikasi dalam <i>Tort</i> , mencakup: (i) <i>intentional tort</i> (ii) <i>negligence</i> (iii) <i>strict liability</i>
3.	Unsur/elemen	Unsur-unsur 1365 PMH: a. Perbuatan tersebut melawan hukum: (i) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;	<i>Element of Tort:</i> 1. <i>harmful/injuries/damages;</i> 2. <i>Causation</i> 3. <i>Duty of care</i> 4. <i>Breach of duty</i>

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 171

		<p>(ii) bertentangan dengan hak subjektif orang lain</p> <p>(iii) bertentangan dengan kesusilaan</p> <p>(iv) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.</p> <p>b. Harus ada kesalahan pada pelaku</p> <p>c. Harus ada kerugian, dan</p> <p>d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.</p>	
4.	Bentuk Ganti Rugi/Jenis Kompensasi	<p>Ganti rugi (materiil dan immateriil) yang dapat dimintakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan; 2. Nilai kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat (<i>economic loss</i>), dan nilai ganti rugi yang ditimbulkan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monetary damages (compensatory damages/nominal damages);</i> • <i>Punitive damages/exemplary damages</i>

		kepada pihak ketiga	
--	--	------------------------	--

Dalam konteks penerapan Perbuatan Melawan Hukum, jika dikemudian hari dalam penggunaan *Digital signature*, salah satu pihak atau Notaris melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan sebagaimana Pasal *a quo*.

Selanjutnya, berkaitan dengan aturan dalam Undang-Undang tentang kewajiban dari para pihak, baik pengguna, penerima dan penyelenggara *Digital signature* itu sendiri, penulis merujuk pada UNCITRAL *Model Law on E-Signatures*, yang telah memberikan pedoman sebagaimana berikut:

Tabel 3.4

Pedoman perumusan aturan pengguna dan penyelenggara *Digital signature* berdasarkan UNCITRAL *Model Law on E-Signatures*⁹⁵

Aturan bagi Pengguna	Aturan bagi Penyelenggara
<p>1. <i>Where signature creation data can be used to create a signature that has legal effect, each signatory shall:</i></p> <p>(a) <i>Exercise reasonable care to avoid unauthorized use of its signature creation data;</i></p> <p>(b) <i>Without undue delay, utilize means made available by the certification service provider pursuant to article 9 of this Law, or otherwise use reasonable efforts, to notify any person that may reasonably be expected</i></p>	<p>1. <i>Where a certification service provider provides services to support an electronic signature that may be used for legal effect as a signature, that certification service provider shall:</i></p> <p>(a) <i>Act in accordance with representations made by it with respect to its policies and practices;</i></p> <p>(b) <i>Exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by it that are relevant to the certificate</i></p>

⁹⁵ UNCITRAL *Model Law on E-Signatures*



by the signatory to rely on or to provide services in support of the electronic

signature if:

(i) The signatory knows that the signature creation data have

been compromised; or

(ii) The circumstances known to the signatory give rise to a substantial risk that the signature creation data may have been compromised;

(c) Where a certificate is used to support the electronic signature, exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by the signatory that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are to be included in the certificate.

2. A signatory shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph

throughout its life cycle or that are included in the certificate;

(c) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain from the certificate:

(i) The identity of the certification service provider;

(ii) That the signatory that is identified in the certificate had

control of the signature creation data at the time when the

certificate was issued;

(iii) That signature creation data were valid at or before the time when the certificate was issued;

(d) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain, where relevant, from the certificate or otherwise:

(i) The method used to identify the signatory;

(ii) Any limitation on the purpose or value for which the signature creation data or the certificate may be used;

(iii) That the signature creation data are valid and have not been compromised;

(iv) Any limitation on the scope or extent of liability stipulated by the certification service provider;

	<p>(v) <i>Whether means exist for the signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law;</i></p> <p>(vi) <i>Whether a timely revocation service is offered;</i></p> <p>(e) <i>Where services under subparagraph (d) (v) are offered, provide a means for a signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law and, where services under subparagraph (d) (vi) are offered, ensure the availability of a timely revocation service;</i></p> <p>(f) <i>Utilize trustworthy systems, procedures and human resources in performing its services.</i></p> <p>2. <i>A certification service provider shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph 1.</i></p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya, berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan *digital signature*, jika merujuk pada *Article 8* dan *Article 9 UNCITRAL Model Law on E-Signatures*, dalam Penyelenggaraan *Digital signature* harus menyelenggarakan sistemnya secara andal, aman, dan bertanggung jawab terhadap operasi sistem sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Pasal 15 UU ITE. Lebih lanjut, dengan mengikuti konsep UU Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 16 UU ITE, prinsip praduga harus bertanggung jawab (*presumed liability*) secara hukum kepada pelaku usaha atas sistemnya. Kecuali jika hal tersebut terjadi karena kesalahan pengguna, atau karena *force majeure*. Pengguna tidak dapat dibebankan terhadap

adanya kesalahan sistem karena mereka tidak mempunyai akses ke dalam untuk melihat pembuktian tersebut. Berdasarkan Pasal 35 UU ITE, pengguna hanya cukup membuktikan bahwa bukti yang dimilikinya bukan merupakan hasil rekayasa. Meskipun dalam UU ITE tidak dicantumkan adanya prinsip *strict liability*, tetapi sesuai prinsip keadilan interaktif, penerapannya dapat diberlakukan terhadap Penyelenggaraan *Digital signature* yang secara ceroboh atau gegabah menyelenggarakan sistem tanpa mengindahkan *risk management* yang layak.

Pada dasarnya, Notaris dibebaskan dari tanggung jawab atas kesalahan ataupun malfungsi dari sistem Penyelenggaraan *Digital signature* yang merugikan penggunanya.⁹⁶ Karena notaris hanya melakukan fungsi legalisasi tanpa ikut bertanggung jawab terhadap legalitas para pihak. Penerapan prinsip tersebut dalam Penyelenggaraan *Digital signature* adalah bersifat kasuistik dan tergantung kepada hak prerogatif hakim dengan kewajiban moral untuk menggali petunjuk yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan, berikut integritasnya dalam memutus sesuai perasaan keadilan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas bahwa penggunaan *digital signature* oleh Notaris dianggap dapat menjadi solusi atas permasalahan dalam kedaruratan kesehatan dan pandemi COVID-19 sebagaimana telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Diseases* 2019 (COVID-19). Hal tersebut diperkuat dengan peran Notaris dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan *Digital signature* yang menegaskan bahwa Notaris dalam penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris dibebaskan dari tanggung jawab atas kesalahan dari sistem elektronik yang menyelenggarakan *Digital signature* tersebut. Namun, Notaris menjadi pejabat umum yang tertinggal untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik, terutama dalam penyesuaian dengan kondisi kedaruratan kesehatan tersebut. Ketertinggalan tersebut juga dijustifikasi dengan akibat hukum dari penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris yang

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 175

akan berkekuatan sebagai akta di bawah tangan sepanjang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum mengatur penerapan *digital signature* terhadap Akta Notaris.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris dapat dilakukan jika dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris belum memiliki keabsahan sebagai Akta Autentik mengingat ketentuan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Dengan demikian, penggunaan *Digital signature* terhadap Akta *Relaas* atau Akta *Partij* belum memiliki keabsahan, walaupun terhadap Akta *Relaas* masih memungkinkan dalam hal pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris. Keabsahan dari penggunaan suatu *Digital signature* juga didasarkan pada sistem elektronik yang aman, andal dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) PP PSTE yang menegaskan bahwa *Digital signature* memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal *a quo*.
2. Permasalahan dalam kedaruratan kesehatan dan pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Diseases* 2019 (COVID-19) menghambat seluruh aktivitas masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Penggunaan *Digital signature* oleh Notaris dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan tersebut, mengingat kebutuhan terhadap sertifikasi elektronik yang kian masif. Notaris dalam penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris juga dibebaskan dari tanggung jawab jika terjadi kesalahan pada sistem elektronik yang menyelenggarakan *Digital signature* tersebut. Namun, dalam penyesuaian terhadap kondisi kedaruratan kesehatan tersebut, Notaris justru menjadi pejabat

umum yang tertinggal untuk menyelenggarakan jasanya secara elektronik. Hal ini juga dijustifikasi dengan penggunaan *Digital signature* terhadap akta notaris yang berakibat hukum terhadap Akta tersebut menjadi berkekuatan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak terpenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sehingga penggunaan *Digital signature* akan mendegradasi kekuatan pembuktian akta Notaris menjadi akta di bawah tangan sepanjang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum mengatur penerapan *Digital signature* terhadap Akta Notaris.



B. SARAN

1. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kekosongan hukum dari penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris mengingat kebutuhan sertifikasi elektronik oleh Notaris yang semakin masif, maka perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Selanjutnya, diperlukan revisi terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m yang membatasi Notaris untuk melakukan penandatanganan di hadapan penghadap, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang dibutuhkan dalam permasalahan kedaruratan kesehatan dan pandemi COVID-19 untuk menyelenggarakan sertifikasi elektronik dianggap harus mengetahui bahwa urgensi atas penyelenggaraan sertifikasi elektronik tersebut juga berkaitan dengan penggunaan *Digital signature* terhadap Akta Notaris. Penggunaan *Digital signature* juga dipermudah dengan dibebaskannya Notaris dari tanggung jawab jika terjadi kesalahan pada sistem elektronik yang menyelenggarakan *Digital signature* tersebut. Namun, selama belum dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris, maka perlu menjadi perhatian bagi Notaris dan masyarakat yang akan menggunakan jasa Notaris bahwa penggunaan *Digital signature* akan berakibat hukum terhadap Akta tersebut menjadi berkekuatan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Kencana, Jakarta, 2017
- Analisa Y, Agus Trisaka, **Cyber Notary "Realita dan Idealita"**, UPT. Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Edmon Makarim, **Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary**, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013
- G.H.S Lumbun Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1996
- Ghansham Anand, **Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia**, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018
- Habib Adjie, **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris**, Refika Aditama, Jakarta, 2011
- Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Information Security Committee, Section of Science & Technology – America Bar Association, **Digital signature Guideliness**, American Bar Association, United States, 1996
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, **Ke Notaris**, Raih Asas Sukses, Depok, 2009
- Irawan Soerodjo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia**, Arkola, Surabaya, 2003
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Johan Bahder Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Nandar Maju, Bandung, 2008
- Komar Andasasmita, **Notaris I**, Sumur Bandung, Bandung, 1981
- Munir Fuady, **Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- Munir Fuady, **Dinamika Teori Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Anke Dwi Saputro (Ed.), **100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang**, Cetakan Kedua, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, **Batas-batas Kebebasan Berkontrak**, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenade Media Group, Jakarta, 2011
- Philipus M. Hadjon, **Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik**, Surabaya Post, Surabaya, 2001
- R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia**, Rajawali, Jakarta, 1982
- R. Soegono Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2005
- R. Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, 2011
- R.A. Emma Nurita, **Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran**, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Rudyanti Dorotea Tobing, **Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik**, Lasbang Justia, Yogyakarta, 2012
- Soemarno Partodihardjo, **Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Sudikno, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Tan Thong Kie, **Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris**, PT. Ichtihar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Van Pramodya Puspa, **Kamus Hukum**, Aneka Ilmu, Semarang, 1977
- Yudha Bakti Ardhiwisastra, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, PT Alumni Bandung, Bandung, 2000

JURNAL

Edmon Makarim, **Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary Di Indonesia**, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 41, No. 3, 2011

Fahma Rahman Wijanarko, **Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang**

Nomor 2 Tahun 2014, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Vol. II No. 2 Juli - Desember 2015.

Dewa Ayu Widya Sari, **Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

TESIS

Joan Venzka Tahapary, **Keabsahan Tanda Tangan Digital Sebagai Alat Bukti**, Tesis, FH UI, 2011

Zainatun Rossalina, **Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik**, Tesis, FH UB, 2016

INTERNET

Andes Wili Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, diakses dari <https://vivajusticia.law.uqm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/> (1 Maret 2021)

<https://blog.privv.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/> (15 Maret 2021)

<https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2015/08/new-eu-regulation-for-electronic-signatures/> (8 April 2021)

<https://www.luxtrust.com/e-signature-levels-and-legal-value/> (9 April 2021)

Julius Indra Dwipayono, *Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, diakses dari www.legalitas.org

Sudut Hukum, *"Sejarah Notaris di Belanda dan Indonesia"* diakses dari <https://suduthukum.com/2016/08/sejarah-notaris-di-belanda-dan-indonesia.html> (5 Maret 2021)

W.W. Smitters, "*History of the French Notarial System*", diakses dari https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7217&context=penn_law_review (5 Maret 2021)

XXIV. *International Congress Of Latin Notaries, "CONCLUSIONS OF THE WORKING GROUP FOR THEME II "The Notary and electronic contracts"* diakses dari <https://www.uinl.org/documents/20181/72328/MexicoTema+II++Conclusiones+%28EN%29/3c09d040-56ba-4f5a-8efd-720807df8c12> (22 Desember 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PSTE").

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

LAIN-LAIN

EU Regulation No. 910/2014/EU on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions in the Internal Market

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

Model Law on Electronic Signatures

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

Model Law on E-Commerce